

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara dengan seribu pulau dan kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia termasuk negara terluas ke-14 di dunia dengan luas negara 1.904.569 km² terdiri dari 17.504 pulau. Secara resmi, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 38 provinsi hingga tahun 2024 ini. Indonesia dengan luas wilayah yang mencakup berbagai pulau dan ekosistem yang beragam, memberikan tempat tinggal bagi penduduk yang jumlahnya sangat besar. Mengutip data dari *World Meter*, hingga Rabu, 27 Maret 2024 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 279.202.033 jiwa. Jumlah Penduduk Indonesia setara dengan 3,45% total penduduk dunia.



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia tahun 1950 – 2024

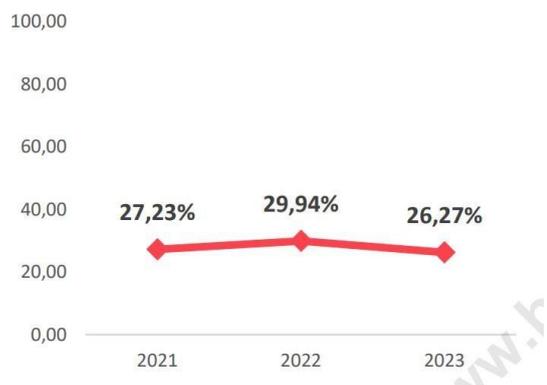
Sumber : Susenas 2024

Bonus demografi Indonesia dimulai tahun 2015 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada periode 2020 - 2035. Bonus demografi terjadi jika

tingkat kelahiran menurun yang sehingga persentase penduduk dengan rentang usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Dengan keadaan yang seperti ini, Indonesia memiliki peluang dan tantangan baru dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, diperlukan dukungan dalam bentuk kebijakan pembangunan manusia yang berfokus untuk kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Hal ini penting karena bonus demografi tidak akan terwujud secara otomatis tanpa adanya peran kelembagaan yang memastikan pemerataan pembangunan.

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai bentuk implementasi Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan. Dari hal tersebut, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah tindakan pemenuhan kebutuhan masa sekarang dengan memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan ini menekankan keseimbangan dalam tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional, yang menuntut partisipasi dan kerja sama dari seluruh pihak. Konsep ini telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 dengan mengutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bentuk upaya besar yang melibatkan berbagai pihak dan mencakup beragam tujuan. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB) sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan berkelanjutan..

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah sebuah blueprint komprehensif yang digagas oleh PBB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. 17 tujuan SDGs mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan. SDGs mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perubahan iklim. Agenda ini merupakan kesepakatan global yang melibatkan seluruh negara anggota PBB untuk mencapai tujuan bersama pada tahun 2030.



Gambar 1.2 Grafik Persentase Penduduk Indonesia yang mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir tahun 2021-2023

Sumber : <https://bps.go.id>

Indonesia masih tergolong sebagai negara yang berkembang, dimana tingkat kesehatan di Indonesia masih kurang baik. Data Susenas menunjukkan bahwa sekitar 26 dari 100 dari penduduk Indonesia mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di tahun 2023 berdasarkan *Self Assessed Health* (SAH) dimana individu memberikan penilaian pribadi terhadap kesehatan mereka sendiri. Data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang melaporkan keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir

cenderung berfluktuasi atau tidak konsisten, menunjukkan bahwa kondisi kesehatannya masih belum optimal.

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) telah mempengaruhi kondisi kesehatan Negara Indonesia secara signifikan. Pandemi COVID-19 berdampak pada sulitnya pencapaian target pembangunan kesehatan dalam tiga tahun terakhir yang mengakibatkan capaian pembangunan sumber daya manusia tidak optimal. Sebelum masuknya COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan kesehatan berupa ketidakseimbangan gizi. Menurut data UNICEF, di dunia ini tersebar sebanyak tujuh juta anak *stunting*, dua juta bayi dengan berat badan kurang, serta dua juta anak yang mengalami obesitas. Bukan hanya itu, data tersebut juga menunjukkan sebagian besar wanita hamil mengalami anemia akibat kurangnya asupan zat gizi mikro dari makanan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko malnutrisi pada ibu dan bayi. Dampak pandemi dapat memperburuk situasi dengan meningkatnya kemiskinan, permasalahan pangan, keterbatasan akses dan harga bahan makanan bergizi mikro masih menjadi tantangan utama (UNICEF, 2020).

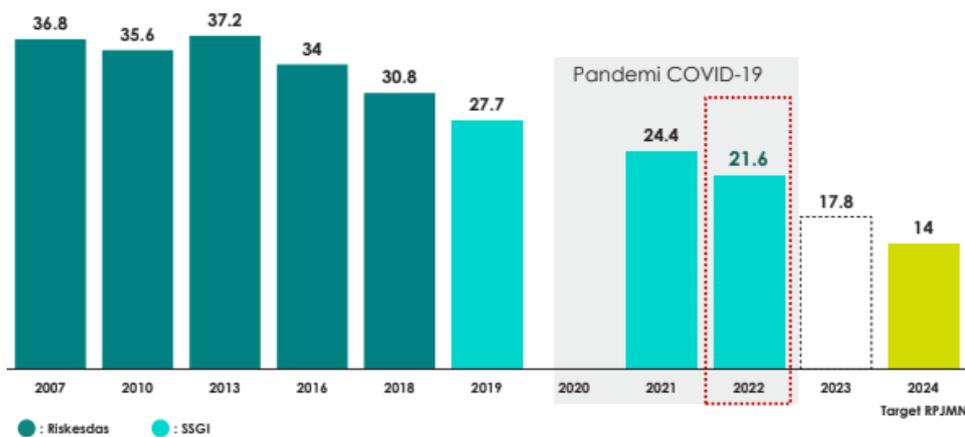
Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah masa kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi dan stimulasi yang tidak memadai selama periode ini dapat menyebabkan *stunting*, yang ditandai dengan tinggi badan yang pendek dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Dampak *stunting* dapat berlangsung seumur hidup. Anak dikategorikan mengalami *stunting* jika tinggi badannya berada di bawah dua standar deviasi (-2SD) dari rata-rata anak seusianya. Data global menunjukkan bahwa masalah *stunting*

masih menjadi tantangan besar, terutama di negara berkembang (Fenske et al., 2013).

Perlambatan pertumbuhan berat badan sejak dini, baik sebelum maupun setelah kelahiran, merupakan faktor risiko utama terjadinya *stunting*. Studi di Malawi mengkonfirmasi hal ini, di mana bayi yang lahir dengan panjang badan pendek cenderung mengalami gangguan pertumbuhan linear yang berkelanjutan. Bayi yang mengalami *stunting* lebih berisiko terhadap angka morbiditas serta mortalitas meningkat, daya tahan tubuh yang menurun, serta kerentanan yang lebih besar terhadap infeksi. Dalam jangka panjang, *stunting* dapat menghambat kemampuan anak untuk mengembangkan potensi kognitif dan fisiknya, yang berimplikasi pada produktivitas kerja dan status sosial-ekonomi di masa depan. *Stunting* juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme, termasuk penurunan oksidasi lemak, sehingga meningkatkan risiko akumulasi lemak sentral dan resistensi insulin yang berpotensi memicu penyakit degeneratif

Upaya untuk menghapuskan *stunting* menjadi prioritas global sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Target penurunan *stunting* 40% pada tahun 2025 merupakan tantangan besar yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pembangunan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan. Dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan intervensi gizi sensitif, kita berharap dapat menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. *Stunting* dihadapi melalui intervensi spesifik dan sensitif, dengan harapan dapat menurunkan angka *stunting* secara signifikan.

Intervensi gizi sensitif, yang melibatkan berbagai sektor pembangunan di luar kesehatan, memiliki peran krusial dalam mengurangi *stunting*. Sekitar 70% penurunan angka *stunting* diperkirakan berasal dari upaya-upaya lintas sektor ini, yang menyasar masyarakat secara luas, tidak hanya ibu hamil dan balita.



Gambar 1.3 Grafik Angka *Stunting* di Indonesia dari tahun 2017 - 2022
Sumber: SSGI 2022

Angka *stunting* di Indonesia mulai dari tahun 2007-2016 terpantau stagnan dan naik turun di angka 30% ke atas. Selanjutnya di tahun 2016 hingga tahun 2022 data angka *stunting* di Indonesia cenderung menurun, yang berarti ada peningkatan terhadap intervensi penurunan *stunting*. Data SSGI 2022 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penurunan *stunting* di Indonesia. Angka prevalensi yang turun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya merupakan kabar baik. Namun, angka 21,6% masih jauh dari target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu terus berupaya lebih keras untuk mencapai tujuan eliminasi *stunting*. Karena orang tua yang memiliki kondisi tubuh sehat besar kemungkinannya untuk menghasilkan generasi sehat dan terbebas dari *stunting*.

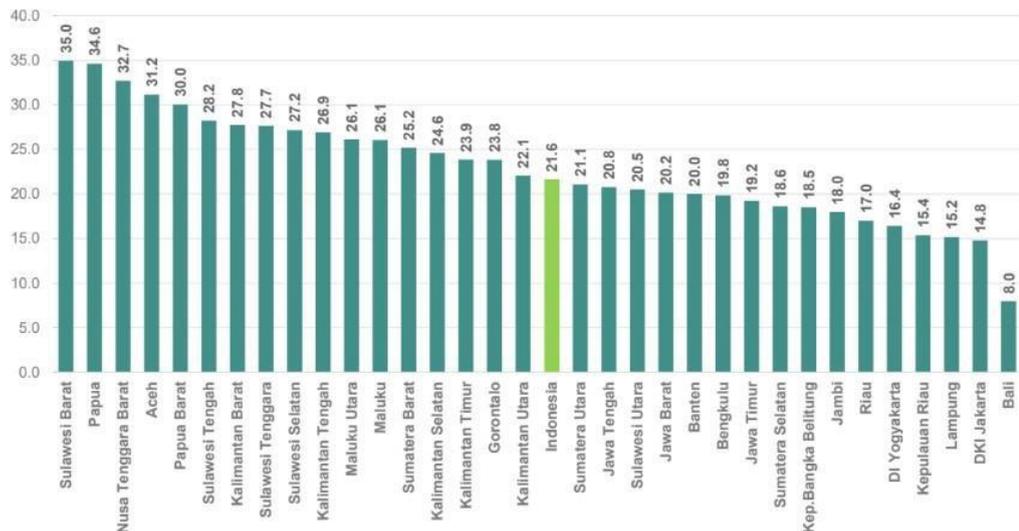
Pendidikan ialah faktor krusial dalam menyadarkan warga masyarakat pada dalam pemahaman mengenai urgensi gizi untuk kesehatan anak. Sektor pendidikan dapat mendukung dengan menyediakan program pendidikan kesehatan dan gizi di sekolah, serta melalui pendidikan orang tua. Pemerintah juga harus memperhatikan sektor pertanian dan pangan sebagai langkah pemenuhan gizi di Indonesia. Sektor pertanian dan pangan berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bergizi, terutama bagi keluarga yang rentan mengalami *stunting*. Akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan bersih merupakan faktor penting dalam mencegah *stunting* karena dapat membantu mengurangi resiko penyakit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Pemerintah Indonesia telah memberikan mandat kepada BKKBN untuk memimpin upaya percepatan penurunan *stunting* di seluruh wilayah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024.

Dalam rangka mempercepat penurunan angka *stunting*, BKKBN telah menyusun Rencana Aksi Nasional yang tertuang dalam Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024. Peraturan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang memberikan mandat kepada BKKBN untuk memimpin upaya penurunan *stunting*. Salah satu

langkah strategis yang tercantum dalam peraturan ini adalah intervensi khusus pada keluarga yang memiliki risiko tinggi *stunting*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah signifikan dalam konteks otonomi daerah, untuk mengatasi masalah *stunting* secara lokal. Jawa Tengah telah menetapkan target menurunkan prevalensi *stunting* di bawah 20% pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi telah menerapkan 8 aksi konvergensi pencegahan *stunting*. Pendekatan konvergensi ini melibatkan berbagai sektor, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

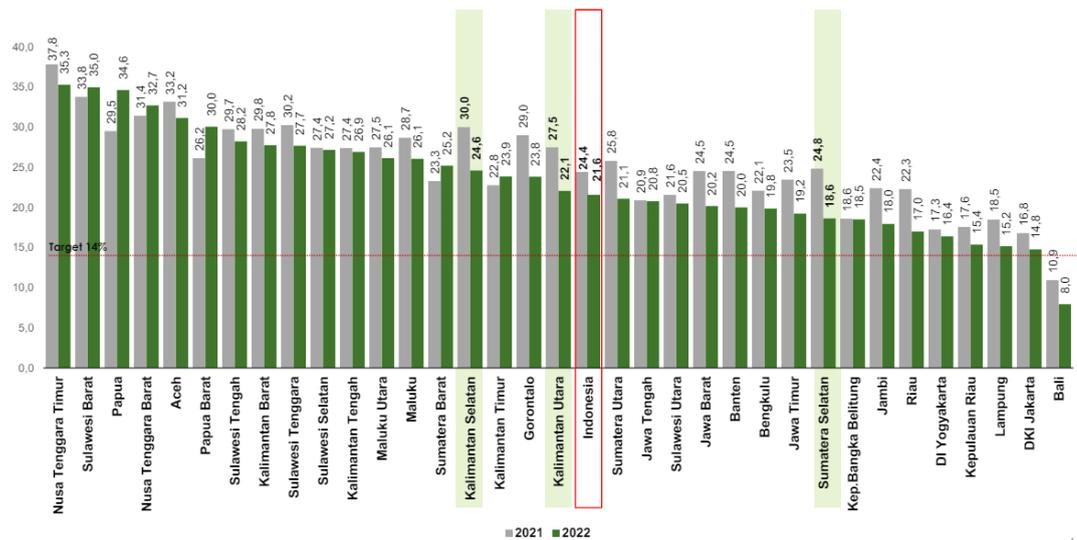


Gambar 1.4 Grafik Prevalensi Balita *Stunting* berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur Tahun 2022

Sumber: SSGI 2022

Presentase *stunting* tahun 2022, berdasarkan data SSGI diketahui masih di angka 20 persen setiap provinsi. Data ini mengungkap perbedaan signifikan pada

stunting dalam tingkat balita di berbagai provinsi di seluruh negeri. Dalam konteks ini, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi yang menduduki peringkat ke-20 dalam hal tingkat *stunting*, dengan angka mencapai 20,8%. Meskipun menduduki peringkat ke dua puluh, namun harus tetap ditangani oleh pemerintah setempat. Pentingnya dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah gizi *stunting* di wilayah tersebut dan provinsi-provinsi lain di Indonesia guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih sehat di masa depan.



Gambar 1.5 Grafik Angka *Stunting* Berdasarkan SSGI Tahun 2021 dan 2022 Setiap Provinsi di Indonesia
Sumber: SSGI 2022

Berdasarkan data SSGI setiap provinsi seluruh Indonesia tahun 2021 dan 2022 Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami penurunan yang signifikan, hanya sebesar 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, jika dibandingkan dengan persentase *stunting* di Indonesia, Jawa Tengah hanya terpaut 0,8 persen. Hal ini berarti tingkat *stunting* di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi dan perlu tindakan yang lebih signifikan dalam menurunkan *stunting*.

Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 menetapkan bahwa Kabupaten Pati masuk menjadi Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi tahun 2020. Keputusan ini menandakan bahwa Kabupaten Pati perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penurunan *stunting*. Balita yang *stunting* di Kabupaten Pati pada tahun 2018 terhitung sejumlah 4038 balita yaitu 5,31% dari 76.116 balita. Kasus *stunting* pada balita ini menurun di tahun 2019, dimana hanya berjumlah 3134 balita (4,2% dari 74.599 balita). Sedangkan pada 2020 terdapat peningkatan yang signifikan karena sebanyak 3997 balita atau 5,68% dari 70.388 balita di Kabupaten Pati mengalami *stunting*. Kasus *stunting* pada balita di Kabupaten Pati tahun 2021 sebanyak 4.281 yaitu 6,10 persen dari total balita 70.150. *Stunting* yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak. Sumber: <https://radarkudus.jawapos.com/pati/691651041/angka-stunting-balita-di-kabupaten-pati-sentuh-4281-kasus>.

Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Bupati Pati nomor 11 Tahun 2020, sebagai langkah untuk percepatan mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Pati. Tujuan dari peraturan bupati ini adalah menurunkan kasus *stunting* hingga kurang dari 20% di tahun mendatang. Berdasarkan penelitian dari Aina Shinta Malinda dan Chatila Maharani (dalam Jurnal berjudul Analisis Implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Pati yang diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 11, Nomor 3, Mei 2023) yang memperlihatkan penelitian mengenai

implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Pati mengenai *stunting* dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektoral, pelibatan masyarakat, dan pelatihan tenaga kesehatan untuk mendukung implementasinya. Dalam pelaksanaan sosialisasi, Puskesmas cenderung kurang efektif dibandingkan Dinas Kesehatan. Informasi yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat jelas namun belum sepenuhnya lengkap, sementara Dinas Kesehatan mampu menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada Puskesmas. Selain itu, sosialisasi di Puskesmas kurang konsisten dan hanya dilakukan sekali dalam sebulan.
2. Tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Pati secara umum telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan Perda Penanganan *Stunting*. Namun, ketersediaan data di tingkat Puskesmas masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif.
3. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati sudah cukup baik. Namun, terdapat variasi kinerja di lapangan. Beberapa petugas kesehatan menunjukkan inisiatif yang tinggi, sementara yang lain masih perlu ditingkatkan motivasinya. Selain itu, pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dapat menjadi dorongan bagi seluruh petugas untuk bekerja lebih optimal.

4. Pelaksanaan Perbup Pati tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* belum sepenuhnya optimal dalam hal birokrasi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas untuk menangani penurunan *stunting*.

TAHUN	DASAR PERHITUNGAN	
	SSGI (Survey Status Gizi Indonesia)	e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
2020		5,68%
2021	20,6%	5,76%
2022	23%	5,43%
2023	??	??

Gambar 1.6 Angka Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pati tahun 2020 – 2022

Sumber: <https://patikab.bps.go.id>

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati berdasarkan SSGI cenderung naik di tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 2,4% dari tahun 2021. Menurut e-PPGBM persentase *stunting* cenderung turun dari tahun 2021 sebanyak 0,33% dari tahun sebelumnya. Untuk itu, Bupati Pati mengeluarkan Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati sebagai bentuk tindak lanjut dari kondisi *stunting*. Pj Bupati Pati melalui Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan inovasi bernama BASUH STUPA (Bapak Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Pati) yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

BKKBN mencanangkan Program Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) sebagai inisiatif yang melibatkan berbagai *stakeholder* dan masyarakat, untuk berkontribusi sebagai donatur. Program ini menyediakan

berbagai bentuk bantuan bagi anak-anak berisiko *stunting* usia 0 hingga 2 tahun, seperti dukungan materi, asupan gizi, fasilitas jamban sehat, dan akses air bersih. Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) adalah salah satu strategi pemerintah daerah yang dirancang untuk mendorong partisipasi birokrasi dalam mendukung percepatan penanganan *stunting* di masyarakat. Mengingat penanganan *stunting* memerlukan kerja sama yang terintegrasi dari seluruh *stakeholder*, sehingga diperlukan manajemen kolaboratif.

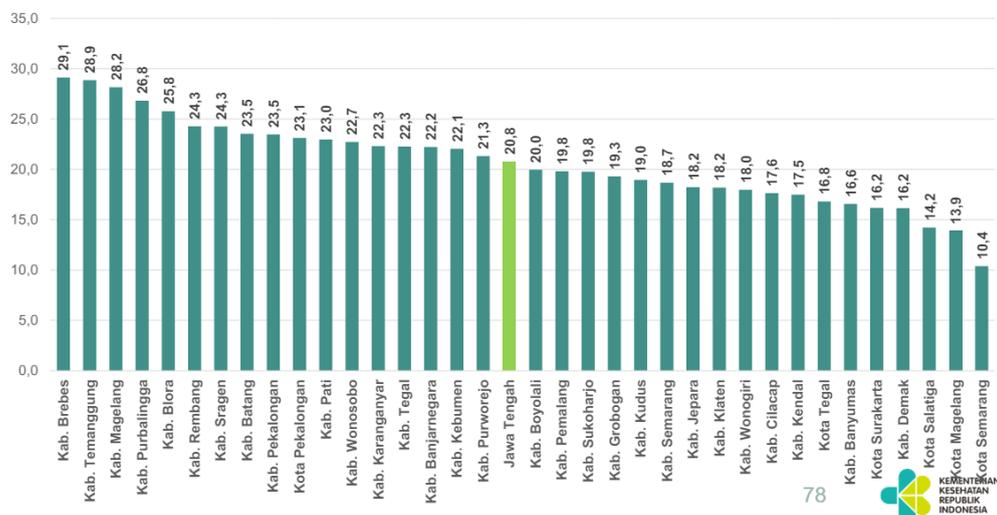
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan tahun 2022, Kabupaten Pati menempati posisi ke-11 dalam peringkat *stunting* di Provinsi Jawa Tengah. Posisi yang relatif tinggi dalam peringkat *stunting* menunjukkan bahwa Kabupaten Pati menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan dan gizi anak. Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada point inovasi nomor 36 terdapat program bernama Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tersebut ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan 108 inovasi daerah dari organisasi daerah, kabupaten, UPT RSUD dan Puskesmas.

Kabupaten Pati menyatakan dukungannya terhadap program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) melalui Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati. Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 4 November 2022. Surat Edaran ini ditujukan kepada

Pimpinan Perangkat Daerah, Perusahaan / Badan Usaha/ Ormas / Organisasi Profesi dan *stakeholder* untuk menjadi Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

Setelah keberjalanan Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati, kasus *stunting* data pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di daerah tersebut masih tergolong tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi program yang perlu ditinjau lebih lanjut. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* lainnya.

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, SSGI 2022



Gambar 1.7 Grafik Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2022 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Sumber: SSGI 2022

Pada tahun 2022, Bupati Pati telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 444/4179.1 sebagai dasar pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam percepatan penurunan angka *stunting*. Untuk mendukung

efektivitas program tersebut, pada tahun 2023 Surat Edaran yang dikeluarkan Bupati Pati Nomor 444.1/5879 tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati memberikan mandat untuk penanganan *stunting* untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerja sama yang solid dan sinergis antara seluruh OPD di Kabupaten Pati Surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar sektor sehingga setiap upaya dapat terfokus pada tujuan utama, yaitu percepatan penurunan *stunting*. Harapan besar diletakkan pada pelaksanaan surat edaran ini agar prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati dapat berkurang secara signifikan pada akhir 2023.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan hasil yang bertolak belakang, pada akhir tahun 2023 Kabupaten Pati justru mengalami penurunan capaian. Prevalensi *stunting* justru meningkat sehingga Kabupaten Pati berada di urutan ke-15 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan kasus ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum mampu diimplementasikan secara optimal. Hambatan seperti kurangnya koordinasi antar OPD, pelibatan *stakeholder* yang belum maksimal, dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam upaya penurunan *stunting*. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang ada untuk memastikan bahwa tujuan penurunan angka *stunting* dapat tercapai secara efektif.



Gambar 1.8 Berita Stunting di Kabupaten Pati Meningkat pada 2023

Sumber: <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/stunting-di-pati-tahun-2023-meningkat-urutan-ke-15-tertinggi-se-jateng/>

Upaya percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan di Kabupaten Pati masih belum optimal. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444.1/5879 tahun 2023 belum mampu menurunkan persentase *stunting* secara signifikan. Dalam Surat Edaran tersebut OPD tidak dijelaskan tugasnya secara spesifik. Penyebab utamanya surat edaran tersebut tidak mencakup tugas semua OPD, sehingga diperlukan adanya peraturan atau surat edaran baru yang sifatnya lebih spesifik menjelaskan peran OPD-OPD yang ada di Kabupaten Pati.



Gambar 1.9 Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444.1/5879 tahun 2023

Sumber <https://www.patikab.go.id/v2/id/se-bupati-no-4441-5879-percepatan-penurunan-stunting/>

Percepatan penurunan *stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan oleh berbagai alasan. Pertama, peran antar *stakeholder* masih belum terkoordinasi dan juga belum mampu berkolaborasi secara maksimal. Penekanan pentingnya keterlibatan antar *stakeholders* juga disampaikan melalui media massa. Pada Jumat (21/6) 2024, diadakan Rembuk *Stunting* Kabupaten Pati yang menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam mengatasi *stunting* di Pati. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Bapak Jumani, menegaskan bahwa penanganan *stunting* memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, sanitasi, ketahanan pangan, dan gizi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati telah menurun sebesar 4,5% dari tahun 2022. Untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024, diharapkan TPPS serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) berjumlah 1.020, segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendukung penurunan *stunting* di Kabupaten Pati. Sumber <https://www.patikab.go.id/v2/id/2024/06/22/rembuk-stunting-kejar-penurunan-angka-stunting-di/>

Kedua, Peran antar *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan *stunting* masih kurang jelas, sehingga implementasi kebijakan menjadi rancu mengenai pembagian tugas. Hal ini terbukti dalam Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444.1/5879 tahun 2023 hanya mencakup beberapa OPD (yaitu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Kepala OPD dan Camat

se Kabupaten Pati). Pembagian tugas dalam surat edaran tersebut masih kurang jelas dan belum melibatkan semua pihak *stakeholders* yang terlibat dalam Program Bapak Anak *Stunting* (BAAS). Selain itu, berbagai Rapat Koordinasi juga selalu membahas mengenai penguatan sinergi dan koordinasi antar OPD di Kabupaten Pati.

Kamis, 22 Maret 2022 diadakan Rapat Koordinasi dengan semua OPD yang ada di Kabupaten Pati. Hasil dari rapat tersebut adalah penguatan sinergi untuk Tim konvergensi penurunan *stunting* diharapkan berperan aktif, dengan kelembagaan yang dibentuk oleh kabupaten untuk melanjutkan rencana aksi pemerintah pusat berdasarkan isu strategis di masing-masing kabupaten/kota. Peralihan peran koordinator dari Bappeda ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) diperlukan guna mendukung sinergi dalam berbagai aspek, seperti penanggulangan kemiskinan, keluarga berencana, sanitasi, kesehatan, pendidikan, akses air bersih, gizi baik, dan fokus *stunting*. Pendekatan ini dilakukan melalui intervensi gizi, melibatkan kerja sama multisektor dan multipihak, dengan penekanan pada lokus *stunting*, sanitasi bersih, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan gizi dan air bersih yang memadai. (sumber <https://diskominfo.patikab.go.id/berita/detail/rakor-penurunan-stunting-opd-akan-bersinergi>)

Ketiga, terdapat banyak hambatan yang membuat penanganan *stunting* di Kabupaten Pati masih belum bisa terlaksana dengan baik. Melalui laman berita <https://mitrapost.com/2024/06/10/masih-tinggi-ini-upaya-diskominfo-pati->

[turunkan-angka-stunting/](#) memberitahukan bahwasanya masih diperlukan adanya konvergensi untuk penanganan terhadap *stunting*. Peran *stakeholders* untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Pati belum optimal karena beberapa tantangan yang dihadapi, seperti koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan *stakeholder* yang kurang sinkron. Meski pemerintah Kabupaten Pati telah meluncurkan beberapa inisiatif, termasuk sosialisasi penanganan *stunting* dan pelaporan kinerja aksi Bangda, ada kesenjangan dalam hal pengisian data dan pelaporan yang tepat sehingga perlu diperbaiki.

Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Pati yang terdiri dari 29 Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan Perbekalan Farmasi, bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Pati. Upaya kesehatan yang selama ini dilakukan melibatkan peran serta berbagai sektor, baik sektor kesehatan maupun non-kesehatan. Sektor lain selain kesehatan juga berperan penting dalam pelayanan kesehatan dan mengatasi permasalahan kesehatan yang ada.

Upaya pencegahan dan penanganan *stunting* yang semakin meningkat, diperlukan pendekatan multi sektor. Penanganan *stunting* memerlukan kerja sama antar sektor untuk mengatasi masalah ini secara holistik seperti sektor kesehatan, gizi, pertanian dan pangan. Peningkatan gizi merupakan strategi utama dalam mengatasi *stunting*. Dengan menginisiasi beberapa program gizi dalam pendekatan gizi spesifik untuk pengentasan *stunting* meliputi pendidikan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, program suplementasi gizi (berupa tablet zat

besi dan vitamin A), serta memberikan makanan tambahan atau kudapan kepada anak yang mengalami kekurangan gizi.

James Anderson (1984:5) dalam buku karyanya *Public Policy Making*, memaknai kebijakan publik sebagai rangkaian aktivitas dirancang dengan maksud dan tujuan tertentu, serta dilaksanakan, dipatuhi individu atau sekelompok aktor yang berkepentingan terhadap sebuah permasalahan. Pemerintah merupakan aktor utama dalam setiap permasalahan di masyarakat yang berperan sebagai *policy maker* (pembuat keputusan). Keterlibatan pemerintah dalam pembuatan dan penetapan kebijakan, regulasi, dan program-program penanganan *stunting* sangatlah penting agar mampu mendukung aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dan gizi.

Percepatan prevalensi *stunting* di Indonesia membutuhkan kerjasama dari banyak *stakeholder*, karena *stunting* ini merupakan masalah yang kompleks. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan ini diperlukan untuk mencapai progres yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh. Koordinasi dan kolaborasi di tingkat kementerian dan lembaga perlu diimbangi dengan kerjasama tingkat Kabupaten yang terdesentralisasi hingga desa. Proses koordinasi dimulai dari perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan oleh Tim Pendamping Keluarga. Terlepas dari peran penting pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sektor swasta dan LSM, dan masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung prevalensi penanganan *stunting* melalui berbagai inisiatif program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selain itu, sektor ini dapat membantu dalam dukungan finansial, pengembangan

teknologi yang mendukung gizi dan kesehatan, serta advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan terutama pencegahan *stunting*. Masyarakat sipil dan komunitas lokal juga berperan penting dalam pendidikan masyarakat tentang gizi dan kesehatan, memobilisasi sumber daya lokal, serta memperkuat jaringan sosial untuk mendukung keluarga yang rentan.

Program penurunan *stunting*, menggunakan pendekatan multisektor untuk meningkatkan kualitas intervensi spesifik dan sensitif dengan fokus utama memenuhi indikator yang tercantum dalam lampiran Perpres No 72 Tahun 2021. Peran multisektor diatur oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang dibentuk mulai dari pusat, secara hierarki ke provinsi, lalu ke kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Kolaborasi setiap level pemerintahan di Indonesia berperan penting dalam mempercepat penurunan *stunting*. Pembagian peran kelembagaan pada setiap tingkat berperan penting dalam konvergensi dan integrasi pelaksanaan program pencegahan *stunting* sesuai dengan Pilar 3 Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting*. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat berperan dalam melakukan konvergensi perencanaan dan penganggaran *stunting*, serta upaya penguatan dukungan komitmen, kebijakan, dan program penurunan *stunting*.

Konvergensi multisektor dan multipihak di tingkat desa harus dipastikan tepat sasaran dengan cakupan yang bermakna. Semestinya aksi konvergensi diupayakan agar dapat berjalan dengan tepat, dimanfaatkan dengan patuh, tercatat dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pembagian urusan pemerintahan terkait *stunting* mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Intervensi gizi spesifik menasar secara langsung terhadap pemenuhan gizi hingga usia dua tahun. Tujuan utama intervensi spesifik adalah memastikan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan anak sekaligus menurunkan resiko infeksi. Sementara itu, intervensi gizi sensitif berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencegahan *stunting*, dengan fokus pada faktor seperti ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan, sanitasi, air minum, lingkungan pendukung, dan lain sebagainya.

Kedua intervensi gizi tersebut sebagian besar menjadi urusan pemerintahan wajib konkuren yang tersebar dan menjadi bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Secara teknokratik, intervensi spesifik dan sensitif kemudian dikelola setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara lebih mudah, pelaksanaan urusan terkait *stunting* di daerah yang berkaitan dengan intervensi spesifik mayoritas berhubungan dengan urusan kesehatan dan lebih banyak dikelola oleh OPD Kesehatan (Dinas Kesehatan). Sementara itu, terkait intervensi gizi sensitif, jumlah OPD yang menanganinya berjumlah lebih banyak dan tersebar dalam pengelolaan non-kesehatan. Intervensi gizi sensitif pada umumnya lebih dikenal dengan urusan non kesehatan. Intervensi gizi sensitif diampu oleh banyak OPD dan satuan kerja porsi pembahasannya tidak seluas pembahasan intervensi gizi spesifik.

Kolaborasi antara berbagai OPD sangat penting dalam upaya menanggulangi *stunting*, karena masalah *stunting* tidak hanya bersifat kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait belum optimalnya pengelolaan peran

stakeholders dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dapat diamati dari berbagai aspek. Diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan *stunting*, hingga kurangnya koordinasi antar *stakeholders* dalam perumusan kebijakan yang tepat. Sehingga, penelitian ini menjadi krusial untuk dilaksanakan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan penanganan *Stunting* di Kabupaten Pati terutama dalam Program Bapak Asuh Anak *Stunting*. Berdasarkan atas beberapa penjelasan sebelumnya, diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan peran serta koordinasi dalam penanganan untuk pemerintah Kabupaten Pati terutama dalam meningkatkan kerja sama antar *stakeholder* secara lebih optimal. Sehingga, peneliti tertarik untuk menganalisis *stakeholder* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pati. Pertanyaan yang akan dijawab adalah **"Mengapa Peran *Stakeholder* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dinilai masih belum optimal?"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kabupaten Pati telah menerapkan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), meskipun demikian kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yang berkaitan pada pelaksanaan program penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati, meliputi:

- a) Masih tingginya kasus *stunting* di Jawa Tengah dilihat dari posisi Kabupaten Pati masih berada di urutan ke-11 dengan kasus *stunting*.
- b) Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati belum optimal.
- c) Belum efektifnya Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam menurunkan *stunting* di Kabupaten Pati
- d) Kurang adanya koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam penanganan *stunting* sesuai Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati
- e) Belum jelasnya peran setiap *stakeholder* dalam penurunan tingkat *stunting* di Kabupaten Pati. Sehingga kolaborasi dan koordinasi antar OPD serta *stakeholder* yang terlibat belum optimal.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sejauh ini, maka pokok-pokok yang akan dibahas secara khusus dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dilihat dari teori 5 tepat milik Riant Nugroho?
2. Siapa sajakah *stakeholders* yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *tunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?
3. Bagaimana peran *stakeholders* dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?
4. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi program program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dilihat dari teori 5 tepat milik Riant Nugroho dalam percepatan penurunan *stunting*.
2. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati.
3. Menganalisis peran *stakeholders* dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati.

4. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian mampu digunakan sebagai tambahan informasi, memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori dan ilmu sosial dan politik secara umum. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang kebijakan publik terkait khususnya analisis peran *stakeholders*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis bagi:

a) Penulis

Melalui penelitian ini, semoga penulis dapat memperluas pengetahuan serta wawasan yang dapat diaplikasikan ke berbagai konteks dan situasi, baik akademik maupun profesional mengenai peran *stakeholders* dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Penulis akan terlatih untuk melakukan identifikasi, analisis kepentingan, dan pengaruh *stakeholder* terhadap kebijakan tertentu.

b) Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang

berkaitan dengan jaringan *stakeholders* dalam upaya percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

c) Masyarakat

Penelitian mengenai analisis *stakeholders* ini, diharapkan bisa menyediakan beberapa informasi tambahan mengenai peran masyarakat dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* dimana sangat dipengaruhi oleh kontribusi dan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri terhadap upaya dan program pemerintah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu merupakan langkah penting bagi peneliti untuk membandingkan penelitian yang ada, sekaligus untuk memastikan keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Keberadaan penelitian terdahulu berperan krusial dalam mencegah duplikasi, dengan cara memetakan persamaan serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan adanya pembaruan dan pengembangan dalam topik yang diteliti.

Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai referensi dan acuan dalam memperbanyak konsep serta teori yang berkaitan dengan judul yang diteliti, sehingga dapat memberikan alur yang jelas dalam menyusun kerangka teori. Penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian sebelumnya mengenai analisis peran *stakeholders* dalam

penanganan *stunting* di Kabupaten Pati melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam menambah bahan kajian serta melengkapi riset yang sedang dilaksanakan.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Teori dan Metode Penulisan	Perbedaan dengan Penelitian
1	Wardhani, L., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Peran <i>Stakeholder</i> dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 12(3), 725-740	Menganalisis peran <i>stakeholder</i> serta faktor pendorong dan penghambat dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Peran <i>stakeholder</i> Nugroho (2014: 16-17), dapat diklasifikasikan menjadi <i>Policy Creator</i>, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. - Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dengan <i>Power vs Interest Grid</i> dari Aden dan Ackermann dalam Setiawan et al. (2020: 7-8), mengkategorikan <i>stakeholder</i> ke dalam empat jenis berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap program atau kebijakan yaitu <i>subject, key players, context setter, dan crowd</i> 	<p>Penelitian ini lokusnya lebih spesifik yaitu di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. <i>Stakeholder</i> yang terlibat <i>stakeholder</i> negara (Dinas Kesehatan, Puskesmas Bandarharjo, dan Kelurahan Tanjung Mas), <i>civil society</i> (masyarakat dan posyandu), dan <i>stakeholder</i> swasta yaitu PT PLN Indonesia Power Semarang. Setiap <i>stakeholder</i> tersebut memiliki peran tersendiri yang terdiri dari peran <i>policy creator</i>, koordinator, implementator, fasilitator serta akselerator.</p> <p>Penelitian saya, lebih fokus terhadap <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dan lokusnya ada di pemerintah daerah Kabupaten Pati. Pada penelitian saya melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati, masyarakat, sektor swasta (<i>private</i>), dan masih banyak lagi. Penelitian yang saya lakukan membahas juga mengenai kelebihan serta kekurangan.</p>
2	Puspita, N. L., & Harsono, D. (2023).	Menganalisis <i>stakeholder</i> dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Teori 	Lokus penelitian berada di Kabupaten Bantul. Disebutkan jumlah

	<p><i>Stakeholder Analysis Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Bantul. Journal of Public Policy and Administration Research</i>, 8(2), 14</p>	<p>penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Bantul dengan identifikasi, klasifikasi, dan investasi hubungan antar <i>stakeholder</i></p>	<p>Pengelompokan <i>stakeholder</i> (Eden & Ackermann, 1998) yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu: <i>subject, key, players, crowd, contest setters</i> (Eden & Ackermann, 1998).</p>	<p><i>stakeholder</i> yang terlibat berjumlah 18 dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, LSM dan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai klasifikasi <i>stakeholder</i> berdasarkan tingkat pengaruh serta kepentingannya.</p> <p>Didapatkan bahwa dari semua <i>stakeholder</i> tersebut, masih terdapat beberapa <i>stakeholder</i> yang kurang terlibat.</p>
3	<p>Purnomo, D., Herwandito, S., Waruwu, K. J. M., Renyoet, B. S., & Mangalik, G. (2023). Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Salatiga dalam Peluang dan Tantangan. <i>Visi Sosial Humaniora</i>, 4(2), 81-98.</p>	<p>Upaya optimalisasi multi-pihak dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kota Salatiga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Teori Analisis Multi-Pihak menggunakan teori kajian <i>Pentahelix</i> dan pendekatan konsep 5K: Kota/ Pemerintah, Kampus, Korporat/Perusahaan, Komunitas, dan Kampung. 	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo menitikberatkan percepatan <i>stunting</i> di Kota Salatiga dengan menggunakan metode pentahelix untuk menganalisis <i>stakeholder</i> yang terlibat. Menggunakan pendekatan konsep 5K: Kota/Pemerintah, Kampus, Korporat/ Perusahaan, Komunitas, dan Kampung.</p> <p>Penelitian saya, lebih fokus terhadap <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dan lokusnya ada di pemerintah daerah Kabupaten Pati. <i>Stakeholder</i> yang terlibat pun cukup kompleks karena melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati, masyarakat, sektor swasta (<i>private</i>), dan masih banyak lagi. Penelitian yang saya lakukan membahas kelebihan serta kekurangan.</p>

4	Ipa, M., Yuliasih, Y., Astuti, E. P., Laksono, A. D., & Ridwan, W. (2023). <i>Stakeholders' role in the implementation of stunting management policies in Garut Regency. Indonesian Journal of Health Administration, 11(1), 26-35.</i>	menganalisis secara kualitatif peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan penanganan <i>stunting</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - teori pemangku kepentingan (Elwy dkk.,2022),dengan (1) mengidentifikasi pihak-pihak dan kepentingannya; (2) mengkategorikan dan mengklasifikasikan nya; (3) menjajaki hubungan para pihak. 	<p>Terdapat 16 pemangku kepentingan yang menerapkan kebijakan penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Garut. Peran mereka dikelompokkan menjadi pemangku kepentingan utama, kunci, dan pendukung. Para pengambil kebijakan telah menjalankan tanggung jawabnya meskipun beberapa bidangnya tidak terkait dengan <i>stunting</i>. Akibat adanya hambatan ego antar sektor, strategi konvergensi di bidang ini tidak berjalan maksimal. Dalam penelitian ini, diperlukan juga cara untuk mengkaji dalam memaksimalkan partisipasi <i>stakeholders</i> dalam tim konvergensi.</p> <p>Penelitian saya, lebih fokus terhadap <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dan lokusnya ada di pemerintah daerah Kabupaten Pati. <i>Stakeholder</i> yang terlibat pun cukup kompleks karena melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati, masyarakat, sektor swasta (private),dan masih banyak lagi. Skripsi membahas kelebihan serta kekurangan. Dan tidak berfokus pada <i>collaborative governance</i> dan menyebutkan OPD yang terlibat.</p>
---	---	---	---	--

5	Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). <i>Collaborative governance</i> dalam penanganan <i>stunting</i> . Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 18(3), 383-391.	mengetahui pelaksanaan proses kolaborasi dalam penanganan	Kualitatif deskriptif Teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi.	Penelitian berfokus pada proses kolaborasi dalam penanganan <i>stunting</i> di UPTD Puskesmas Ciampel yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Menggunakan konsep <i>collaborative governance</i> , namun tidak disebutkan secara rinci nama dari sektor swasta yang dimaksud. Dengan adanya kolaborasi dengan UPTD Puskesmas Ciampel mampu menurunkan jumlah <i>stunting</i> .
6	Hermawan, M. F., Yudha, E. P., Kusno, K., & Nugraha, A. (2023). Konvergensi Aktor Kelembagaan Dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Sumedang. <i>Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis</i> , 9(1), 727-740.	Mengetahui tingkat pengaruh dan ketergantungan serta hubungan antar aktor kelembagaan dalam upaya penanganan <i>stunting</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Metode MACTOR (Fauzi, 2019) untuk identifikasi aktor yang berperan dalam penanganan <i>stunting</i> serta analisis <i>stakeholder</i>. <p>Tahapan dalam analisis dengan metode <i>Mactor</i> (Fauzi, 2019) antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi yang topik yang akan dianalisis; 2. melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan informan kunci 3. mengidentifikasi aktor yang terlibat dan tujuan yang 	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan prosedur statistik (pengukuran) dengan lokus Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan Metode MACTOR untuk identifikasi aktor yang berperan dalam penanganan <i>stunting</i>. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktor dengan menganalisa konvergensi (potensi kerjasama) dan divergensi (potensi konflik) hubungan antar aktor terkait dengan posisi dan objektif atau tujuan para <i>stakeholder</i>.</p> <p>Penelitian saya, lebih fokus terhadap <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dan lokusnya ada di pemerintah daerah Kabupaten Pati dengan menggunakan teori Peran</p>

			akan dicapai.	<i>stakeholders</i> dari Nugroho.
7	Noerjoedianto, D., Ibnu, I. N., & Wisudariani, E. (2024). <i>Analysis of The Role of Stakeholders in Efforts to Reduce the Acceleration of Stunting: A Case Study in a Quality Family Planning Village Locus</i> . Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health, 6(1), 372-386.	menganalisis wawasan dan peran pemangku kepentingan dalam menurunkan <i>stunting</i> di lokus desa KB berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Peran pemangku kepentingan yang terdiri dari fasilitator, koordinator, akselerator, evaluator, dan pembuat kebijakan 	Penelitian ini, membahas secara gamblang mengenai peran pemangku kepentingan yang tertuang jelas dalam Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Konvergensi dan sinergitas antar <i>stakeholders</i> sudah terjalin dengan baik. Penelitian saya, lebih fokus terhadap <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dan lokusnya ada di pemerintah daerah Kabupaten Pati. <i>Stakeholder</i> yang terlibat pun cukup kompleks karena melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati, masyarakat, sektor swasta (private), dan masih banyak lagi. Lokus penelitian saya di Kabupaten Pati, sedangkan penelitian ini lebih spesifik berlokus di Kampung KB.
8	Toda, H. (2024). <i>Government Coordination In Implementing Stunting Weighing Operations In Kupang City</i> . Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1), 48-66.	untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Operasi Penimbangan <i>Stunting</i> di Kota Kupang.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif <p>Teori Syafie (2011, p. 35) yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk koordinasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Horizontal b. Koordinasi Vertikal c. Koordinasi Fungsional 	Perbedaan dengan penelitian saya adalah, penelitian ini lebih berfokus kepada koordinasi dalam penanganan <i>stunting</i> . Penelitian saya lebih bertujuan untuk menganalisis <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam program BAAS dan berlokus di Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini, sangat bergantung pada koordinasi vertikal dan horizontal dalam

				menangani <i>stunting</i> . Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendidikan.
9	Kusnadi, D., & Nge, H. J. (2024). <i>Actor Collaboration in Implementing Stunting Handling Policy in Landak District. Indonesian Journal of Advanced Research</i> , 3(1), 81-94.	mengetahui dan menganalisis kolaborasi aktor dalam implementasi kebijakan penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Landak.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif deskriptif - Teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi. 	<p>Penelitian oleh Kusnadi dkk berfokus pada <i>collaborative governance</i> yang membentuk jaringan kebijakan. Kolaborasi yang terbentuk dari sektor private, swasta dan pemerintah.</p> <p>Permasalahan terletak pada adanya ego sektoral dalam implementasi kebijakan penanganan <i>stunting</i>. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada analisis <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Pati.</p>
10	Amanda, R. Z. T., & Widowati, N. (2024). Peran <i>Stakeholders</i> dalam Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Banjarnegara. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 13(1), 1-18.	Identifikasi dan analisis peran <i>stakeholders</i> , faktor pendorong dan penghambat <i>stakeholders</i> dalam kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Banjarnegara.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Maryono et al (dalam Setiawan, 2020), <i>stakeholders</i> dikategorikan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>stakeholders</i> primer, b. <i>stakeholders</i> kunci, c. <i>stakeholders</i> sekunder, - Nugroho (dalam Setiawan, 2020) mengklasifikasikan peran <i>stakeholders</i> menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Policy creator</i>, 	<p>Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian amanda dkk berlokasi di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan penelitian saya mengambil lokus di Kabupaten Pati. Dinas yang terlibat dalam program BAAS lebih kompleks dan bervariasi.</p> <p>faktor pendorong peran <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari partisipasi aktor dan sumber kebijakan. Faktor penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam</p>

			<p>b. <i>Coordinator</i>, c. <i>Fasilitator</i>, d. <i>Implementor</i>, e. <i>Akselerator</i>,</p>	<p>pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari keterampilan kader posyandu dan perspektif masyarakat terkait permasalahan <i>stunting</i>.</p>
11	<p>Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy And Management Review</i>, 10(3), 194-207.</p>	<p>mengidentifikasi <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif di Kota Semarang serta melakukan analisis terhadap perannya</p>	<p>- Kualitatif - Nugroho (dalam Setiawan, 2020) mengklasifikasikan peran <i>stakeholders</i> menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Policy creator</i>, o <i>Coordinator</i>, o <i>Fasilitator</i>, o <i>Implementor</i>, o <i>Akselerator</i>, 	<p>Penelitian hanya berfokus untuk meneliti <i>stakeholders</i> yang terlibat dan peran dengan teori Nugroho. Identifikasi <i>stakeholders</i> menggunakan pengelompokan <i>state, civil society, dan private sector</i>.</p> <p>Dalam penelitian skripsi ini, penulis menjelaskan juga mengenai implementasi program BAAS dan juga faktor pendorong dan penghambat peran <i>stakeholder</i>.</p>
12	<p>Alifisyiam, F. N., Herawati, A. R., & Purnaweni, H. (2024). Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Penurunan Angka Prevalensi <i>Stunting</i> di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>, 13(2), 1-20.</p>	<p>Mengidentifikasi <i>stakeholders</i> yang terlibat dan menganalisis peran <i>stakeholders</i> dalam penurunan angka prevalensi <i>stunting</i> di Kota Semarang</p>	<p>- Kualitatif - Kategorisasi <i>Stakeholders</i> Maryono et al. (dalam Yuniningsih & Suwitri, 2021; Hidayat dkk, 2020) yakni: <i>Stakeholder</i> Primer, <i>Stakeholder</i> sekunder, <i>Stakeholder</i> kunci</p> <p>- Bryson (2003) peran <i>stakeholder</i> dibagi menjadi empat kategori,</p>	<p>Lokus penelitian di Kota Semarang. Penelitian hanya berfokus untuk meneliti <i>stakeholders</i> yang terlibat dan peran dengan teori Nugroho. Identifikasi <i>stakeholders</i> menggunakan pengelompokan <i>Stakeholder</i> Primer, <i>Stakeholder</i> sekunder, <i>Stakeholder</i> kunci.</p> <p>Meskipun membahas <i>stunting</i>, namun tidak dibahas mengenai program khusus, hanya secara general. Sedangkan skripsi ini membahas secara spesifik mengenai implementasi program BAAS dan juga</p>

			yakni: <i>subject, key, players, crowd, contest setters</i>	faktor pendorong dan penghambat peran <i>stakeholder</i> .
13	Salsabela, R. R., Santoso, R. S., & Subowo, A. (2024). Peran Aktor dalam Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 13(2), 214-231.	Mengidentifikasi aktor dan menganalisis peran aktor dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat aktor dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Klasifikasi aktor atau <i>stakeholder</i> menurut Maryono (dalam Soselissa, 2021) yaitu : Aktor primer, Aktor sekunder, Aktor kunci - Nugroho (dalam Setiawan, 2020) mengklasifikasikan peran <i>stakeholders</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o <i>Policy creator</i>, o <i>Coordinator</i>, o <i>Fasilitator</i>, o <i>Implementor</i>, o <i>Akselerator</i>, - faktor pendorong dan penghambat peran aktor (Destiana, Rizka: 2020) : a. Nilai b. Komunikasi a. Kepercayaan b. Kebijakan 	Penelitian ini menyoroti peran aktor, namun lokusnya adalah Objek Wisata Goa Kreo di Kota Semarang bukan <i>stunting</i> . Teori klasifikasi identifikasi aktor yang digunakan berbeda dengan penelitian yang saya gunakan. Selebihnya untuk mengklasifikasikan peran aktor dan juga untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat peran aktor menggunakan landasan teori yang sama.
14	Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota	Menganalisis peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Nugroho (dalam Setiawan, 2020) mengklasifikasikan peran <i>stakeholders</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o <i>Policy creator</i>, o <i>Coordinator</i>, o <i>Fasilitator</i>, 	Penelitian berfokus pada pengembangan desa wisata di Semarang. Tidak disertai dengan identifikasi <i>stakeholders</i> , langsung menganalisis peran <i>stakeholder</i> menggunakan teori Nugroho. Dalam membahas mengenai

	Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 11(2), 315-335.	dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Implementor</i>, ○ <i>Akselerator</i>, 	faktor pendorong dan penghambat peran <i>stakeholder</i> tidak menggunakan teori Destiana, namun didapatkan langsung dari lapangan.
15	Gayatri, N. A. P., Warsono, H., & Santoso, S. (2023). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 13(1), 1-14.	menganalisis peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dan mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Townsley (dalam Hidayah, dkk, 2019) mengklasifikasikan <i>stakeholder</i> menjadi dua kelompok diantaranya yaitu : <i>stakeholder</i> primer dan <i>stakeholder</i> sekunder. 	Penelitian ini ingin menganalisis peran <i>stakeholder</i> namun tidak menggunakan teori peran <i>stakeholder</i> , hanya mengidentifikasi klasifikasi <i>stakeholder</i> saja. Lokus penelitian adalah desa wisata Jatirejo di Kota Semarang. Penelitian ini tidak menyangkut ketepatan pada implementasi kebijakan.
16	Situmorang, G. E. M., Yuningsih, N. Y., & Darmawan, I. (2022). Efektivitas Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. <i>Jurnal</i>	mengetahui efektivitas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - efektivitas implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2012) yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. 	Penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisis ketepatan implementasi kebijakan. Dengan lokus dan fokus yang berbeda dengan apa yang dibahas dalam skripsi ini. Namun, penelitian situmorang ini menjadi acuan untuk menganalisis ketepatan implementasi sebuah program sesuai dengan yang ingin dibahas dalam skripsi ini.

	<i>Administrasi Pemerintahan (Janitra)</i> , 2(1), 82.	Covid-19.		
17	Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dalam penyebaran Covid-19 di desa Warembungan. <i>Journal Administrasi Publik</i> , 8(113).	mengetahui Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran COVID19 di Desa Warembungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Menurut Riant Nugroho (2018), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. 	Penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisis ketepatan implementasi kebijakan. Dengan lokus dan fokus yang berbeda dengan apa yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian berfokus pada kegiatan PPKM di Desa Warembungan. Namun, penelitian Mawuntu ini menjadi acuan untuk menganalisis ketepatan implementasi sebuah program sesuai dengan yang ingin dibahas dalam skripsi ini.
18	Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management</i>	mengidentifikasi dan menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Klasifikasi aktor atau <i>stakeholder</i> menurut Maryono yaitu : Aktor primer, Aktor sekunder, Aktor kunci - Nugroho (dalam Setiawan, 2020) mengklasifikasikan peran <i>stakeholders</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o <i>Policy creator</i>, 	Penelitian ini berfokus pada peran <i>stakeholder</i> dan juga implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian pada ibu. Lokus penelitian ini di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Secara garis besar penelitian ini teori yang digunakan sama dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi ini. Namun, dalam penelitian Setiawan ini ditambahkan dengan Jaringan ANT dan tidak membahas mengenai faktor pendorong dan faktor

	<i>Review</i> , 9(2), 127-144.		<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Coordinator</i>, ○ <i>Fasilitator</i>, ○ <i>Implementor</i>, ○ <i>Akselerator</i>, <p>- Bryson (2004) peran stakeholder dibagi empat kategori, yakni: <i>subject, key, players, crowd, contest setters</i></p>	penghambat peran aktor dalam implementasi kebijakan.
19	Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. <i>Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI</i> , 12(2), 74-83.	mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan <i>stunting</i> di Kabupaten Brebes dengan teori eksplorasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - model implementasi kebijakan George Edward III, Marilee S Grindle, dan Mazmanian & Sabatier dalam perspektif segitiga analisis kebijakan 	Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan. Lokus penelitian ini Kabupaten Brebes. Secara garis besar penelitian ini teori tteori yang digunakan berbeda namun bisa dijadikan referensi mengenai penanganan <i>stunting</i> dan kebijakannya dalam pembahasan di skripsi ini.
20	Hatmoko, J. U. D., Putri, D. M., & Hermawan, F. (2020). Analisis Power-Interest Stakeholder terhadap Asuransi Bencana Infrastruktur Publik di Kota Semarang. <i>Media Komunikasi Teknik Sipil</i> , 26(2), 220-228.	menganalisis <i>power dan interest</i> para pemangku kepentingan terhadap penggunaan asuransi bencana pada infrastruktur publik di Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dengan <i>Power vs Interest Grid</i> dari Aden dan Ackerman(2011) yaitu <i>subject, key players, context setter, dan crowd</i> 	Penelitian ini berfokus pada analisis <i>stakeholder</i> dengan <i>power dan interest</i> para pemangku kepentingan. Lokus penelitian ini Asuransi Bencana Infrastruktur Publik di Kota Semarang. Secara garis besar penelitian ini teori identifikasi aktor yang digunakan sama dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi ini.

Sumber : data diolah penulis (2024)

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (Rachman, 2019:5) Administrasi publik sebagai bentuk pengorganisasian pelayan publik yang dikoordinasikan guna mengelola dan menjalankan berbagai macam keputusan dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Administrasi publik hadir dengan mengusung tujuan untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam lingkup publik yang berkaitan dengan kepentingan umum dan melakukan berbagai evaluasi di sektor organisasi SDM dan keuangan.

Keban (2014:3) berpendapat jika administrasi publik lebih menggambarkan keotoriteran pemerintah. Keban menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan ruang bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pemilik kebijakan, dimana rakyat atau masyarakat hanya dianggap sebagai pelengkap semata. Dalam pandangan Keban, pemerintah merupakan agen tunggal yang berkuasa, masyarakat dianggap sebagai pihak pasif dan tidak tau menau mengenai apa kebijakan yang tepat diambil. Masyarakat harus menerima atau tunduk dengan semua kebijakan ataupun peraturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (Pasolong, 2012: 56), mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu usaha kolektif dalam pemerintahan yang berbeda secara signifikan dengan administrasi individu. Administrasi publik melibatkan koordinasi yang kompleks

antara berbagai lembaga dan aktor, serta memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melayani kepentingan publik.

George J. Gordon (dalam Syafii, 2010) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses yang melibatkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, administrasi publik berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semua kegiatan ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan publik.

Dari berbagai perspektif, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses pengelolaan sumber daya pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Kegiatan-kegiatan dalam administrasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Thomas S. Kuhn dalam kutipan (Ulya dan Abid, 2015:255) memiliki pendapat bahwa paradigma adalah cara pandang seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dianut pada suatu masa yang mana meliputi nilai-nilai, sebuah metode, dan sebuah prinsip mendasar.

Nicholas Henry, berpandangan bahwa di dalam administrasi publik terdapat enam paradigma yakni:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1990-1926)

Pada awal perkembangan studi administrasi publik, paradigma dikotomi politik sangat dominan Frank J. Goodnow

menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi yang berbeda namun saling terkait yaitu:

a. Fungsi politik

Pemerintah diharapkan dapat memusatkan perhatian pada pembentukan kebijakan serta mengekspresikan dan mewujudkan kehendak rakyat.

b. Fungsi administrasi

Fungsi ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan. Dalam menentukan tujuan dan rumusan kebijakan badan legislatif dan yudikatif saling bahu membahu. Sementara badan eksekutif terpisah dan apolitis dalam pelaksanaan kebijakan. Paradigm inihanya menekankan dari aspek luar saja yakni birokrasi pemerintahan dan kurang membahas mengenai pengembangan metode administrasi publik.

2. Prinsip- Prinsip Administrasi (1927-1937)

Perhatian terhadap lokus administrasi publik kurang ditekankan dalam periode ini, sementara fokus utama adalah pada "prinsip-prinsip" manajerial berlaku untuk semua jenis organisasi maupun lingkungan budaya. Ilmu administrasi publik dan ilmu politik memiliki fokus yang berbeda dalam memandang proses perumusan kebijakan. Jika ilmu politik lebih menitikberatkan pada dinamika politik dan dampak kebijakan terhadap masyarakat, maka administrasi publik cenderung fokus pada aspek teknis pelaksanaan

kebijakan. Paradigma ini lebih menekankan pada prinsip administrasi publik, yang dikenal dengan POSDCORB, terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Coordinating, Directing, Reporting, and Budgeting*. Dalam hal ini fokus lebih ditekankan daripada lokus karena prinsip tersebut bersifat fleksibel dan dapat ditempatkan dimana saja termasuk pada organisasi pemerintahan.

3. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ketiga menandai era baru di mana hubungan antara administrasi publik dan ilmu politik menjadi semakin erat. Keduanya dianggap saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Praktik administrasi publik sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan nilai-nilai yang ada “*value free*” (bebas nilai), sehingga tidak bisa dianggap sebagai ilmu yang murni objektif.

Administrasi publik selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu dan tidak bersifat universal. Dalam hal ini terjadi perdebatan pendapat antara dua belah pihak. John Gaus mengajukan argumen bahwa teori administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari teori politik. Hal ini memicu pemahaman baru yang menempatkan administrasi publik sebagai bagian integral dari ilmu politik. Namun pada dasarnya administrasi publik merupakan suatu seni dalam pengambilan keputusan yang bertujuan menjalin kerjasama bukan untuk menimbulkan sebuah konflik.

4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Fase ini menandai percabangan dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Satu cabang berfokus pada penguatan dasar-dasar ilmu administrasi melalui pendekatan psikologi sosial, sementara cabang lainnya mengalihkan perhatian pada formulasi dan implementasi kebijakan publik. Meskipun demikian, cabang kedua seringkali kurang jelas dalam menentukan ruang lingkup dan fokus kajiannya.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Fokus administrasi publik dalam paradigma ini tertuju pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Lokus kajiannya pun sangat luas, meliputi segala hal yang berkaitan dengan urusan publik, kepentingan masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

6. *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma keenam merupakan paradigma terbaru yang muncul sebagai hasil dari perkembangan ilmu administrasi publik yang dibangun berdasarkan serangkaian paradigma sebelumnya. Pandji Santosa dalam bukunya *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance* mengungkapkan tiga pilar dalam paradigma ini, yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Perbedaan utama paradigma ini dengan paradigma sebelumnya terletak pada penekanan pada konsep *governance* yang menggantikan konsep *government*, yang mencakup perpaduan antara ketiga pilar

paradigma. Dengan demikian, perkembangan paradigma ini berfokus pada tercapainya *good governance* atau pemerintahan yang baik. Administrasi publik kini difokuskan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, dan rasional.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam, yaitu paradigma *Governance*, yang fokus utamanya adalah pada penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utama paradigma ini adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan utama mencapai kepuasan maksimal dari masyarakat yang dilayani.

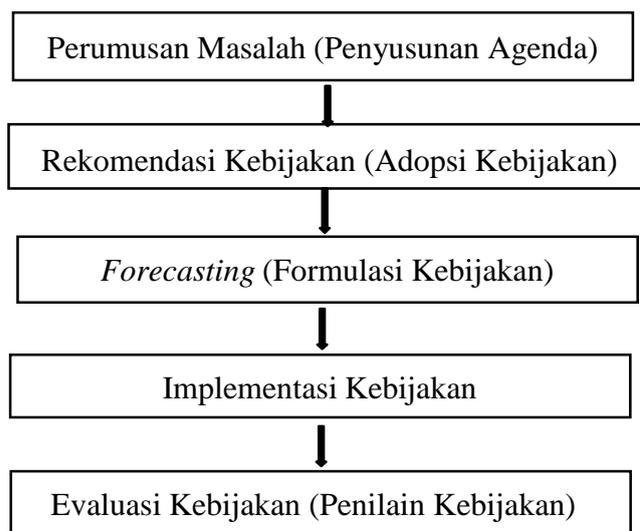
1.5.4 Kebijakan Publik

Anderson berpendapat bahwa kebijakan sebagai tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, ditetapkan satu atau lebih aktor yang bertujuan mengatasi masalah tertentu (Winarno, 2007: 18). Kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah, baik itu untuk melaksanakan suatu tindakan atau memilih untuk diam, tidak melakukan apapun (*whatever government choose to do or not to do*) (Nugroho, 2009 : 86). Menurut Carl Friedrich (1969), kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan individu, kelompok, atau pemerintah itu sendiri yang memiliki hambatan dan peluang. Kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan (Leo Agustino, 2006: 7).

Menurut William N. Dunn (1994), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh birokrasi pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor-sektor krusial seperti keamanan,

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, dan perkotaan. Dalam Riant Nugroho D. (2004:3) menurut Thomas R. Dye kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah, alasan dan hasil yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan bersama. David Easton (dalam Nugroho, 2004:4) kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat. (Nugroho, 2003: 110) lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan nilai moral, etika dalam implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kebijakan dibagi menjadi tiga jenis kebijakan publik berdasarkan pembuat kebijakan yaitu legislatif, eksekutif, dan kebijakan yang dihasilkan oleh kerjasama antara legislatif dan eksekutif (atau sebaliknya) (Riant Nugroho, 2009: 135). William N. Dunn dalam (Winarno, 2012: 35-37) menguraikan proses pembuatan kebijakan publik menjadi beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu:



Gambar 1.10 Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik Menurut Dunn
Sumber : William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terj. Muhadjir Darwin) Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2000 hlm 25.

Tahapan proses pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling terkait, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Birokrat yang terlibat mempunyai peran untuk menentukan masalah yang diangkat menjadi agenda publik. Sebelum itu, banyak masalah yang ada harus bersaing untuk mendapatkan tempat agar menjadi agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai alternatif kebijakan yang telah diajukan. Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, para pembuat kebijakan akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi, sehingga dapat memilih solusi yang paling efektif dan efisien.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah melalui tahap perumusan dan evaluasi, satu alternatif kebijakan ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Keputusan ini memperoleh legitimasi karena didukung oleh lembaga legislatif, kesepakatan berbagai pihak yang berkepentingan, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Setelah ditetapkan, kebijakan publik akan diimplementasikan oleh berbagai unit organisasi yang memiliki sumber daya dan

kepentingan yang berbeda-beda. Proses implementasi ini seringkali diwarnai oleh dinamika internal organisasi, di mana dukungan dan penolakan terhadap kebijakan dapat terjadi secara bersamaan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan, diperlukan evaluasi yang sistematis. Setelah kebijakan diterapkan, evaluasi akan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian ini berfokus pada tahap implementasi kebijakan publik, khususnya Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi BAAS, mengidentifikasi aktor yang terlibat, menganalisis peran *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan memetakan peran serta interaksi antara aktor-aktor tersebut, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana koordinasi, alokasi sumber daya, dan strategi implementasi mempengaruhi efektivitas program dalam mengatasi *stunting*. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor kunci yang berperan dalam mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi program. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan kebijakan,

memastikan bahwa intervensi yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan lokal, serta memperkuat upaya kolaboratif dalam mencapai hasil yang lebih optimal bagi anak-anak di Kabupaten Pati.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik menurut Mulyadi (2018) adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh lembaga atau beberapa orang dalam rangka mengimplementasikan kebijakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan rasional. Seperti yang dijelaskan oleh van Meter dan van Horn (Subianto, 2020), implementasi kebijakan melibatkan beragam pihak, baik individu maupun kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang bekerja sama untuk mencapai sasaran kebijakan. Implementasi melibatkan pelaksanaan berbagai kegiatan dan strategi yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencapai hasil yang dituju.

Menurut Dewi (2022) tujuan kebijakan dalam pelaksanaan dengan hasil kegiatan akan terhubung dan masalah publik dapat teratasi jika implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pendapat dari Satspi dan Mufidayati (2019) bahwa implementasi kebijakan berfokus kepada tahap yang dilakukan agar tujuan kebijakan tercapai. Berdasarkan pandangan beberapa ahli, Implementasi kebijakan adalah kegiatan aktif yang melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan kebijakan dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses ini memerlukan koordinasi yang efektif dan pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

Riant Nugroho (2012:107) menggarisbawahi pentingnya “lima tepat” yang harus dipenuhi untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tepat kebijakan

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat masalah yang harus diselesaikan. Keberhasilan kebijakan dapat diukur dari tiga aspek utama. Pertama, seberapa efektif kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang ingin diatasi. Kedua, perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik dari masalah yang dihadapi atau tidak. Ketiga, perumusan kebijakan idealnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki mandat dan keahlian yang relevan dengan bidang yang menjadi fokus kebijakan tersebut.

2. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, kemitraan pemerintah-swasta, dan masyarakat. Pemilihan model pelaksanaan kebijakan tergantung pada tujuan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang bersifat monopoli atau berkaitan dengan kepentingan publik yang luas umumnya lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat atau mendorong partisipasi masyarakat lebih baik jika dilakukan melalui masyarakat

3. Tepat Target

Ketepatan target pelaksanaan kebijakan mencakup tiga hal utama. Pertama, kesesuaian target dan rencana. Kedua, kesiapan kelompok sasaran untuk menerima intervensi kebijakan. Terakhir, sejauh mana kebijakan ini merupakan inovasi baru atau merupakan penyempurnaan dari kebijakan yang sudah ada.

4. Tepat Lingkungan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor yang terlibat. Lingkungan internal dan eksternal kebijakan. Tepat lingkungan mendefinisikan bagaimana lembaga pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak-pihak terkait lainnya berkoordinasi dan bekerja sama. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan meliputi beberapa faktor, pertama, *public opinion*, mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut; kedua, *interpretive institution*, mencakup peran lembaga-lembaga strategis seperti media massa dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan; ketiga, *individuals*, yaitu individu-individu yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi opini publik dan arah kebijakan.

5. Tepat Proses

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, tepat proses dibagi kedalam tiga proses, yaitu :

1) *Policy acceptance*, penerimaan kebijakan bergantung pada

pemahaman publik dan pemerintah terhadap kebijakan yang ditetapkan. Publik melihat kebijakan sebagai proyeksi masa depan, pemerintah melihat kebijakan sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

- 2) *Policy adoption*, berkaitan dengan penerimaan publik dan pemerintah terhadap kebijakan yang ditetapkan. Publik menerima kebijakan diperlukan untuk masa depan, pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- 3) *Strategic readiness*, Terkait dengan kesiapan pelaksanaan kebijakan, publik siap untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang telah ditetapkan, sementara pihak birokrasi siap untuk menjalankan kebijakan sebagai pelaksana yang ditunjuk.

Penelitian ini mengukur efektivitas implementasi program mengadopsi teori Nugroho karena dianggap relevan, lebih sesuai konteks, dan lebih efektif dalam menilai keberhasilan implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) sebagai bentuk penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pati.

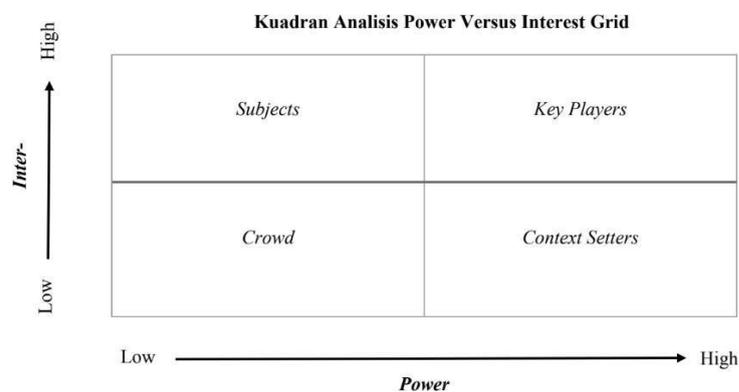
1.5.6 Analisis Stakeholder

Menurut WHO (dalam LAN RI, 2015), pemetaan atau analisis *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan setiap aktor terkait, termasuk kelompok, pihak utama, dan institusi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu kebijakan atau program.

Melalui analisis ini, kita dapat memetakan peta relasi antar aktor, mengidentifikasi aktor baru yang perlu dilibatkan, dan mengukur kesiapan kapasitas institusi dalam mendukung pelaksanaan program.

Schiffer (dalam LAN RI, 2015) memperkenalkan *net mapping* sebagai sebuah metode visual untuk menganalisis jaringan hubungan antar berbagai aktor dalam suatu sistem. Teknik ini sangat berguna untuk memahami dinamika dan pengaruh berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu. Proses *net mapping* melibatkan beberapa langkah, mulai dari mengidentifikasi dan mengelompokkan aktor, memetakan hubungan antar aktor, hingga menganalisis pengaruh relatif setiap aktor.

Bryson (2004:15) menjelaskan bahwa ada 8 teknik dalam memetakan *stakeholder*, namun dalam konteks penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *Power Versus Interest Grid*. Pemetaan *stakeholder* dengan teknik ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) dari setiap *stakeholder*.



Gambar 1.11 Kuadran Analisis *Power Versus Interest Grid*
Sumber : Bryson (2004)

Ackermann & Eden (2011), membagi *stakeholder* kedalam empat

kategori berdasarkan kekuasaan (*power*) dan kepentingannya (*interest*) sesuai Gambar 1.10. Keempat kategori tersebut meliputi :

- a) *Subject*, adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang rendah, Meskipun kapasitasnya terbatas dalam mencapai tujuan, *stakeholder* ini bisa menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan *stakeholder* lain.
- b) *Key players* (pemain kunci) adalah *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi. *Key players* merupakan *stakeholder* penting yang layak mendapatkan perhatian dari manajemen berkelanjutan.
- c) *Crowd* (kerumunan) adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang rendah. Meskipun memiliki potensi, peningkatan interest dan/atau power tidak sebanding dengan usaha dan waktu yang dibutuhkan.
- d) *Context Setter* (pendukung) adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang tinggi. *Context Setter* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi konteks masa depan secara keseluruhan, dan dengan meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan membangun *interest* untuk mengubahnya menjadi *players*.

Dalam jaringan *Stakeholders*, penting bagi peneliti untuk memahami peran masing-masing *stakeholder*. Menurut Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017), ada beberapa bentuk peran yang dapat dijalankan oleh *stakeholder*, yaitu:

- a. *Policy creator* yaitu *stakeholders* yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. *Koordinator* yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat.
- c. *Fasilitator* yakni *stakeholders* yang berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. *Implementor* yakni *stakeholders* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. *Akselerator* yakni *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Analisis pemangku kepentingan berfokus pada pemahaman dinamika kekuasaan dan meningkatkan transparansi dan kesetaraan pengambilan keputusan dalam proyek-proyek pembangunan. Tanpa adanya analisis pemangku kepentingan, terdapat bahaya bahwa pemangku kepentingan yang mempunyai hubungan baik dan pengaruh yang besar akan berpengaruh banyak terhadap hasil pengambilan keputusan daripada kelompok yang terpinggirkan; (Kamar, 1994, 1997).

Oleh karena itu, tergantung pada agenda yang mendasari pihak-pihak yang melakukan proses tersebut, analisis pemangku kepentingan dapat disalahgunakan untuk memberdayakan atau meminggirkan kelompok tertentu.

Faktor Pendukung dan Penghambat peran *stakeholder* menurut (Destiana, 2020) dapat diambil dari fenomena sebagai berikut:

1. Nilai adalah kemampuan dan komitmen individu yang melaksanakan dalam sebuah kebijakan. Nilai merujuk pada harga, kedalaman mutu dan jumlah isidari sesuatu. Nilai diinterpretasikan sebagai prinsip atau standar penentu kualitas yang dianggap penting. Schwartz, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh Dahriyanto (2018), nilai digambarkan sebagai tujuan individu dengan tingkat kepentingan yang bervariasi, serta menjadi prinsip yang membimbing perilaku dalam konteks sosial. Analisis peran *stakeholders* memiliki beberapa nilai seperti: nilai individual, organisasi, legalitas, dan profesionalitas. Nilai individual dilihat dari peran kepemimpinan sebagai penggerak dalam program penanganan *stunting*. Nilai organisasi dilihat dari landasan masing-masing institusi. Terakhir yaitu nilai profesionalitas dilihat dari kemampuan dan komitmen individu yang melaksanakan kebijakan.
2. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu pendukung dalam hubungan kerjasama antar

stakeholders yang terlibat. Hubungan antar *stakeholder* dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh komunikasi yang baik (Destiana, 2020).

3. Kepercayaan menurut KBBI, adalah harapan atau keyakinan seseorang terhadap kejujuran, kebaikan, dan sifat positif lainnya dari orang lain. Sementara itu, Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kerelaan untuk menjadi rentan pada tindakan pihak lain dengan harapan bahwa tindakan ini akan memberikan dampak positif. Dalam hubungan antar-*stakeholder*, meskipun setiap pihak telah melaksanakan tugas dan peran sesuai fungsinya, masih terdapat potensi munculnya rasa kurang percaya. Kepercayaan perlu dibangun melalui komitmen, didukung oleh informasi yang akurat, keahlian, serta upaya konsolidasi hubungan antar pihak yang terlibat.
4. Kebijakan adalah regulasi atau aturan yang dibentuk sebagai petunjuk dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu program yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai tertentu melalui serangkaian tindakan yang terarah. Kebijakan adalah seperangkat aturan atau pedoman yang disusun untuk menghadapi situasi dinamis, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017) yang mengemukakan beberapa bentuk peran, yaitu 1) *Policy creator*,

2)Koordinator 3)Fasilitator 4)Implementor dan 5)Akselerator. Penelitian ini juga menggunakan Teori Pengelompokan *stakeholder* (Eden & Ackermann, 1998) yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu: *subject, key, players, crowd, contest setters*. Teori ini dianggap mampu menganalisis peran *stakeholders* dalam percepatan penurunan *stunting* melalui Program Bapok Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Sedangkan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Bapok Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati menggunakan pendapat dari (Destiana Riska, 2020) yang dilihat dari 4 aspek yaitu :nilai, komunikasi, kepercayaan dan juga kebijakan.

1.5.7 Stunting

Stunting merupakan malnutrisi kronis yang terjadi pada anak kecil dan ditandai dengan lebih pendeknya anak dibandingkan anak pada usia yang sama. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi tidak memadai atau tidak sehat, yang dapat memicu malnutrisi atau infeksi. *Stunting* dinilai berdasarkan tinggi badan terhadap umur (TB/U) dan ambang batas (Z-score) kurang dari -2 standar deviasi (SD) pertumbuhan anak (Berawi, 2020). *Stunting* yang dikenal juga dengan perawakan pendek disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada anak balita pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), atau masa kehidupan janin hingga usia 23 bulan. Sehingga mengacu pada keterlambatan pertumbuhan. Seorang anak tergolong *stunting* jika tinggi atau panjang

badannya kurang dari minus dua deviasi dari tinggi atau panjang anak pada usia yang sama. (TNP2K, 2019).

Kondisi *stunting* dapat diketahui dengan mengukur berat badan, panjang badan, atau tinggi badan anak dan membandingkannya dengan standar berat badan dan tinggi badan yang sesuai. Anak dengan *stunting* akan memiliki hasil pengukuran yang lebih rendah dari normal, sehingga secara fisik tampak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Penilaian ini menggunakan Z-score berdasarkan standar WHO. Kategori gizi anak ditentukan berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (PB/A) atau tinggi badan menurut umur (TB/A). Kondisi ini mencakup pertumbuhan terhambat (pendek) dan pertumbuhan terhambat parah (sangat pendek).

Menurut Bappenas (2018), faktor-faktor seperti ketersediaan pangan, praktik pengasuhan, akses layanan kesehatan, dan sanitasi lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan status gizi anak yang *stunting*. Dengan memperbaiki kondisi di keempat aspek ini, kita mendukung status gizi anak yang optimal.

1.5.8 Program Bapak Asuh Anak *Stunting*

Menurut Buku Panduan Bapak Asuh Anak *Stunting* yang diterbitkan oleh BKKBN (tahun 2022, halaman 5) Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan *stunting* yang menasar langsung keluarga berisiko *stunting*. Elemen bangsa mencakup berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari individu, masyarakat, akademisi, organisasi

profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang berperan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk mencapai target penurunan *stunting*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI). Kedua regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*

Sasaran Buku Panduan Orang Tua Asuh Anak *Stunting* (BAAS) ini adalah calon pengantin, ibu hamil, bayi dibawah usia 2 tahun (balita), dan bayi dibawah usia 5 tahun (balita). Prioritas Program Asuhan (BAAS) adalah:

- a) Bayi dengan pertumbuhan terhambat, ibu hamil dari keluarga berisiko mengalami pertumbuhan terhambat
- b) Catiner, keluarga baru, atau PUS merencanakan kehamilan pada keluarga berisiko *stunting*;
- c) Bayi dengan pertumbuhan terhambat (2 tahun ke atas)
- d) Bayi tidak *stunting* dari keluarga miskin (risiko tinggi *stunting*).

Tujuan utama dari Program adalah (1) Pemberian bantuan langsung berupa asupan gizi tambahan, dukungan kesehatan, atau kebutuhan lainnya untuk anak yang terkena *stunting*. (2) Pemberdayaan masyarakat, karena melibatkan masyarakat luas dan sektor swasta untuk turut serta dalam upaya penanggulangan *stunting*. (3) Percepatan Penurunan *Stunting* dalam mencapai target nasional menjadi 14% pada tahun 2024.

Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) mengajak berbagai pihak untuk bergotong royong membantu anak-anak *stunting* mendapatkan pemenuhan gizi dan pendampingan yang optimal. Misi mulia BAAS adalah (1) Meningkatkan asupan gizi anak *stunting* melalui pemberian makanan tambahan, bantuan pangan, dan edukasi gizi. (2) Memperkuat pendampingan keluarga dalam merawat dan mengasuh anak *stunting* dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. (3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi anak *stunting* untuk memastikan mereka mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang memadai. dan (4) Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait pola asuh dan sanitasi yang sehat untuk mencegah *stunting* di masa depan.

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) melibatkan birokrasi dalam upaya percepatan respon terhadap *stunting* di masyarakat lokal. Mengingat bahwa penanggulangan *stunting* memerlukan kolaborasi yang sinergis di antara pemangku kepentingan, maka pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi pendekatan yang tepat untuk

dipertimbangkan. Pencegahan dan penanganan *stunting* dilaksanakan melalui pendekatan multisektoral dengan intervensi layanan yang terfokus, terpadu, spesifik, dan peka terhadap lingkungan. Melibatkan seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pusat, daerah, kecamatan hingga desa . Peran multisektoral ini dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di berbagai tingkatan.

Wakil kepala daerah berperan lebih aktif mengkoordinasikan pelaksanaan program di daerah untuk mengatasi hambatan birokrasi yang ada. Percepatan penurunan *stunting* memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, antara lain program Orang Tua Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dan Desa Satu Dukungan per OPD. Masyarakat, lembaga, dunia usaha dan pemangku kepentingan secara aktif bersinergi sebagai orang tua asuh untuk secara proaktif melakukan intervensi dan mendukung penanggulangan *stunting* dengan memberikan makanan tambahan dan asupan gizi yang cukup kepada bayi *stunting*.

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) merupakan inovasi dari BKKBN dalam menanggapi percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Program ini tidak mempunyai payung hukum yang spesifik, namun mengacu kepada Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang mendasari terbentuknya program..

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) utamanya ditujukan untuk mengintervensi anak usia bawah dua tahun (baduta) *stunting* melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dimana Indeks PMT baduta pemulihan berdasarkan panduan BAAS dari BKKBN Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000 per hari selama minimal 6 bulan (Rp. 2.700.000/ anak). Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dapat disalurkan melalui rekening TPPS Kabupaten Pati.

Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada point inovasi nomor 36 terdapat program bernama Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tersebut ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan 108 inovasi daerah dari organisasi daerah, kabupaten, UPT RSUD dan Puskesmas.

Kabupaten Pati, menjadi sasaran daerah dengan *stunting* tinggi di Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungannya terhadap program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) melalui Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati. Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 4 November 2022. Surat Edaran ini ditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, Perusahaan / Badan Usaha/ Ormas / Organisasi Profesi dan *stakeholders* untuk menjadi Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).



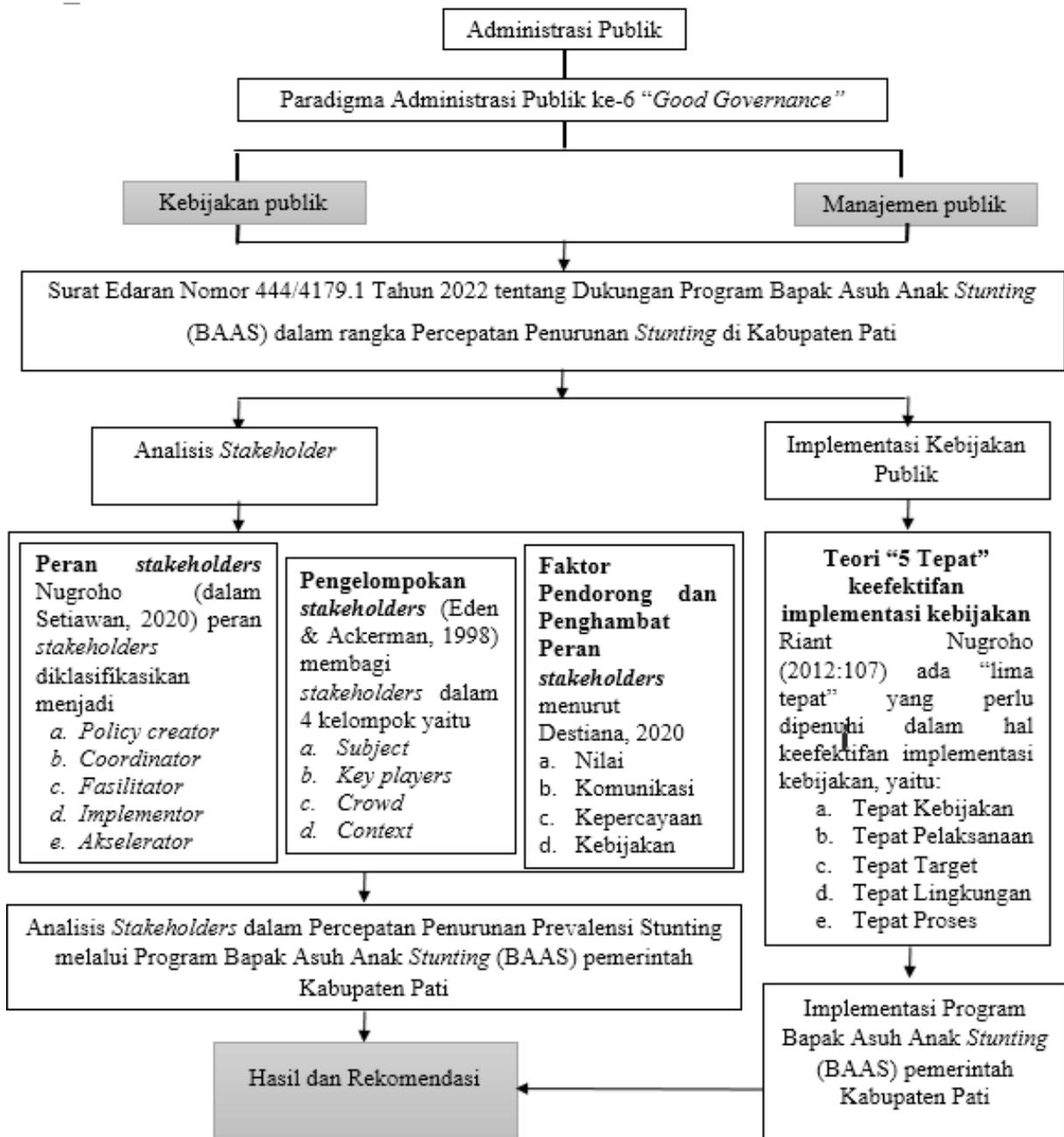
Gambar 1.12 Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022

Sumber : Arsip Dinsos P3AKB Kabupaten Pati

Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program dan berperan aktif dalam Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Keikutsertaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) bersifat sukarela tidak mengikat, dapat perseorangan atau kelompok dalam institusi / organisasi.

Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1986 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati merupakan peraturan yang khusus mengatur mengenai TPPS Kabupaten Pati tahun 2024. Peraturan ini menjelaskan juga mengenai tugas serta pembagian tim dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Pati.

1.5.9 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1.13 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : data diolah penulis (2024)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Stakeholder adalah pihak yang memiliki kaitan erat dengan suatu proyek, perusahaan, atau organisasi. Keputusan yang diambil dapat memengaruhi mereka, begitu pula sebaliknya, tindakan mereka dapat mempengaruhi jalannya suatu proyek. Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) digagas oleh BKKBN dalam mempercepat penurunan *stunting* dengan gotong royong dari seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, masyarakat dan swasta. Kabupaten Pati sebagai kabupaten dengan kasus *stunting* juga menerapkan inovasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang melalui Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

1) Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) adalah proses pelaksanaan program penurunan *stunting* di Kabupaten Pati sesuai dengan Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati. Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati dilihat dari teori “5 tepat” yaitu :

a. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan adalah proses pencapaian tujuan dari Program Bapak Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Pati mampu secara efektif menjawab permasalahan dan mencapai tujuan, serta memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya. Ketepatan kebijakan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati dapat diukur dari gejala :

- 1) Kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah *stunting* di Kabupaten Pati
- 2) Kebijakan sesuai dengan masalah *stunting* di Kabupaten Pati

3) Kebijakan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

b. Tepat Pelaksanaan

Tepat Pelaksanaan adalah keterlibatan aktor yang berperan dalam Program BAAS di Kabupaten Pati sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Aktor implementasi yang dapat berperan sebagai pelaksana kebijakan antara lain adalah pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau sektor swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan. Ketepatan pelaksanaan Bapak Asuh Anak *Stunting* di Pati dapat diukur dari gejala:

- 1) Kesesuaian pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) sesuai dengan kebijakan yang diatur
- 2) Keterlibatan aktor/*stakeholder* yang berperan dalam Program BAAS di Kabupaten Pati

c. Tepat Target

Tepat target adalah tujuan serta respon target Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati tidak bertentangan dengan program maupun kebijakan lain. Target dalam Program BAAS di Kabupaten Pati adalah masyarakat terutama catin, ibu hamil, baduta dan balita. Ketepatan target dapat diukur dari gejala :

- 1) target intervensi sesuai dengan rencana, tidak tumpang tindih (*overlapping*) dan tidak bertentangan kebijakan lain.
- 2) kondisi target siap untuk diintervensi atau tidak.
- 3) Program bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

d. Tepat Lingkungan

Lingkungan dibagi dalam lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mengacu pada interaksi antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan serta lembaga lain yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yaitu persepsi masyarakat Pati terhadap Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Ketepatan lingkungan dapat diukur dari gejala :

- 1) Komitmen yang terjalin antar *stakeholder*
- 2) Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)
- 3) Interaksi antara pelaksana, perumus kebijakan dan lembaga lain yang terlibat dalam Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Pati.

e. Tepat Proses

Merupakan kesiapan pelaksana dan target terhadap kebijakan Program BAAS di Kabupaten Pati. Ketepatan proses dapat diukur dari gejala :

- 1) Kesiapan pelaksana terkait Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati.
 - 2) Kesiapan masyarakat Kabupaten Pati terkait kebijakan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).
- 2) Identifikasi *Stakeholders* adalah mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Untuk mempercepat penanggulangan *stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati, *stakeholders* diklasifikasikan dalam empat kategori berdasarkan kekuasaan (*power*) dan kepentingannya (*interest*). Keempat kategori tersebut meliputi :

- a. *Subject*, adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang rendah.
- b. *Key players*, adalah *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi.
- c. *Crowd*, adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang rendah.
- d. *Context Setter*, adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang tinggi.

Berdasarkan kekuasaan (*power*) dan kepentingannya (*interest*), kategori *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dapat diukur dengan gejala :

- 1) Pengaruh *stakeholder* dapat diukur dari:
 - Pengaruh dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati
 - Kontribusi fasilitas oleh *stakeholder*
 - Kapasitas SDM yang tersedia
 - Dukungan *stakeholder*
 - Kemampuan *stakeholder*
- 2) Kepentingan *stakeholder* dapat diukur dari :
 - Keterlibatan *stakeholder*
 - Manfaat terhadap *stakeholder*
 - Kewenangan *stakeholder*
 - Prioritas *stakeholder*
 - Ketergantungan *stakeholder*

- 3) Peran *stakeholders* adalah kewajiban dan juga hak yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Program Bapak Asuh Anak *Stunting* yang dilaksanakan di Kabupaten Pati ini dibagi kedalam 5 peran *stakeholders* yaitu :
- a. *Policy creator* adalah *stakeholders* yang memiliki peran vital dimana *stakeholders* ini bertugas untuk membuat suatu kebijakan. Gejala yang diamati adalah :
 - 1) Pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan
 - 2) Keterlibatan aktif peran *stakeholder* dalam Program (BAAS) di Pati
 - b. Koordinator adalah *stakeholders* yang memiliki peran mengkoordinir *stakeholders* lain, dengan cara berkomunikasi satu sama lain. Gejala yang diamati adalah :
 - 1) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati
 - 2) Koordinasi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang terlibat dalam Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati
 - c. Fasilitator adalah *stakeholders* yang menjalankan peran untuk memberikan fasilitasi dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi target Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Gejala yang diamati adalah :
 - 1) Pihak yang memberikan fasilitas dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati.
 - 2) Bentuk fasilitas yang diberikan untuk menunjang Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati.

- d. Implementor adalah *stakeholders* yang berperan untuk melaksanakan atau terlibat secara langsung dalam kebijakan, peran ini sering dihubungkan dengan kelompok sasaran dalam suatu kebijakan. Gejala yang diamati :
- 1) Pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati
 - 2) Upaya yang dilakukan untuk keberjalanan Program di Pati
- e. Akselerator adalah *stakeholders* dengan peran membantu *stakeholder* lain untuk memperlancar proses pelaksanaan suatu program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Gejala yang diamati adalah :
- 1) Pihak yang memastikan agar Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran
 - 2) Bentuk upaya yang dilakukan untuk memastikan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.
- 4) Pelaksanaan sebuah program/kebijakan tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendorong adalah berbagai elemen atau aspek yang berperan dalam mempercepat atau memfasilitasi suatu proses, perubahan, atau pencapaian tujuan tertentu. Faktor penghambat adalah berbagai elemen atau kondisi yang menghambat, memperlambat, atau bahkan menghentikan suatu proses atau pencapaian tujuan. Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dalam penelitian ini dapat diukur dari:
- a. Nilai adalah kemampuan dan komitmen individu yang melaksanakan dalam sebuah kebijakan. Nilai dalam penelitian ini diukur dari gejala sebagai berikut:

- 1) Kemampuan masyarakat melaksanakan kebijakan
 - 2) Komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan
- b. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi (pesan, ide) dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang efektif menjadi hal yang mendukung hubungan kolaboratif antara pemangku kepentingan yang terlibat. Gejala yang dapat diukur di lapangan yaitu:
- 1) Kejelasan informasi terkait Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati
 - 2) Komunikasi yang terjalin antar *stakeholder* terkait.
- c. Kepercayaan adalah hubungan yang dibangun antara berbagai pemangku kepentingan melalui ekspektasi perilaku dan perhatian yang positif. Sekalipun pemangku kepentingan menjalankan tugas dan perannya sesuai fungsinya, namun rasa kurang percaya di antara mereka masih bisa terjadi..
- 1) Kepercayaan antar aktor dalam pelaksanaan Program BAAS di Kabupaten Pati
 - 2) Kejujuran dan kepedulian antar *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati
- d. Kebijakan adalah regulasi atau aturan yang dibentuk sebagai petunjuk dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dalam pemberlakuan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* tentunya ada regulasi atau kebijakan yang mendasari berlakunya program tersebut adalah
- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
 - 2) Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024

- 3) Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati
- 4) Kebijakan lainnya

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
Implementasi Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dilihat dari “5 Tepat”	A. Tepat kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah <i>stunting</i> di Kabupaten Pati 2) Kebijakan sesuai dengan masalah <i>stunting</i> di Kabupaten Pati 3) Kebijakan dibuat oleh lembaga yang berwenang.
	B. Tepat pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) sesuai dengan kebijakan yang diatur 2) Keterlibatan aktor/stakeholder yang berperan dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati
	C. Tepat target	<ol style="list-style-type: none"> 1) Target intervensi sesuai dengan rencana, tidak tumpang tindih dengan, dan tidak bertentangan kebijakan lain. 2) Masyarakat Kabupaten Pati dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. 3) Implementasi kebijakan/program bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
	D. Tepat proses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesiapan pelaksana terkait Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati 2) Kesiapan masyarakat Kabupaten Pati terkait kebijakan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS)
	E. Tepat lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen yang terjalin antar <i>stakeholder</i> 2) Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) 3) Interaksi antara pelaksana dan perumus kebijakan dan lembaga lain yang terlibat dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati
Identifikasi <i>stakeholder</i> dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS)	A. Subyek	B. Pengaruh <i>stakeholder</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaruh dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati 2) Kontribusi fasilitas oleh <i>stakeholder</i> 3) Kapasitas SDM yang tersedia
	B. Key Players	
	C. Crowd	

	D. Context Setter	4) Dukungan <i>stakeholder</i> 5) Kemampuan <i>stakeholder</i> C. Kepentingan <i>stakeholder</i> 1) Keterlibatan <i>stakeholder</i> 2) Manfaat terhadap <i>stakeholder</i> 3) Kewenangan <i>stakeholder</i> 4) Prioritas <i>stakeholder</i> 5) Ketergantungan <i>stakeholder</i>
Peran <i>stakeholder</i> dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS)	A. Policy Creator	1) Pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan 2) Keterlibatan aktif peran <i>stakeholder</i> dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati
	B. Coordinator	1) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati 2) Koordinasi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang terlibat dalam Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati
	C. Fasilitator	1) Pihak yang memberikan fasilitas dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) di Kabupaten Pati. 2) Bentuk fasilitas yang diberikan untuk menunjang Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati.
	D. Implementor	1) Pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati 2) Upaya yang dilakukan untuk keberjalanan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati
	E. Akselerator	1) Pihak yang memastikan agar Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran 2) Bentuk upaya yang dilakukan untuk memastikan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran
Faktor pendukung dan penghambat Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS)	A. Nilai	1) Kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan 2) Komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan

	B. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kejelasan informasi terkait Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati 2) Komunikasi yang terjalin antar <i>stakeholder</i> terkait
	C. Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepercayaan antar aktor dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati 2) Kejujuran dan kepedulian antar <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati
	D. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> 2) Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka <i>Stunting</i> Indonesia Tahun 2021-2024 3) Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak <i>Stunting</i> (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Pati 4) Kebijakan lainnya

Sumber : data diolah penulis (2024)

1.7 Argumen Penelitian

Stunting menjadi masalah krusial yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia karena masa depan bangsa dipengaruhi oleh generasi muda yang sehat dan mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Pati menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai kasus *stunting* cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih cepat. Namun, prevalensi *stunting* di Pati menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, bahkan bisa dibilang naik turun (stagnan). Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penulis terhadap kasus *stunting* di Kabupaten Pati yang masih belumbisa diatasi meskipun sudah ada Percepatan

Penurunan *Stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran, keterlibatan, dan kontribusi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melaksanakan program. Peran *stakeholders* penting dalam menekan *stunting*, dengan menganalisis *stakeholders* melalui identifikasi kategori *stakeholders* dan klasifikasi peran *stakeholders*.

Analisis ketepatan implementasi kebijakan dilakukan sebelum menganalisis *stakeholder* bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Langkah ini memungkinkan identifikasi aspek-aspek kebijakan yang berhasil atau mengalami kendala dalam pelaksanaan, sehingga dapat dievaluasi efektivitas serta efisiensinya. Dengan menganalisis implementasi, dapat terlihat ketepatan target, kebijakan, pelaksanaan serta lingkungan. Analisis juga mampu melihat area mana yang membutuhkan peran tambahan atau penyesuaian dari *stakeholder*. Implementasi Program BAAS mempermudah penentuan prioritas dalam keterlibatan *stakeholder*, dan memastikan bahwa jika seluruh pihak yang terlibat untuk berkontribusi sesuai dengan perannya dalam mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Analisis *stakeholders* mampu menghasilkan evaluasi dampak Program BAAS terhadap prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati. Berdasarkan analisis *stakeholders*, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk memperkuat dan mempercepat penurunan prevalensi *stunting*. Analisis *stakeholder* adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek, kebijakan, atau inisiatif tertentu. Analisis *stakeholder* membantu dalam memahami kepentingan dan prioritas pemangku kepentingan yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk kriteria

evaluasi. Studi ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana program Bapak Asuh di Kabupaten Pati melibatkan berbagai pihak dalam upaya penurunan *stunting*, serta memberikan wawasan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas program serupa di daerah lain.

Namun pengurangan angka *stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati belum optimal *stakeholders* terkait ditunjukkan dengan penurunan kasus *stunting* yang belum optimal serta koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* yang belum maksimal. Keterlibatan *stakeholder* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program BAAS sangat diperlukan untuk menurunkan *stunting* di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis bagaimana implementasi Program menggunakan teori “5 tepat”, mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat yang berorientasi pada partisipasi dan kerjasama berbagai jaringan aktor dan mengidentifikasi peranan melalui teori peran *stakeholder* serta mengetahui faktor pendorong serta faktor penghambat dalam pelaksanaan penurunan percepatan *stunting* melalui. Menganalisis indikasi masalah *stunting* sebagai permasalahan publik yang didasari oleh implementasi kebijakan penurunan *stunting* serta menganalisis kendala peran *stakeholder* dengan memandang teori kendala sumber daya manusia. Peneliti mengambil judul mengenai Analisis Peran *Stakeholder* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 2) metode penelitian adalah cara untuk memperoleh informasi dan data dari fenomena yang sedang diteliti. Penelitian

selalu memiliki tujuan tertentu, seperti untuk penemuan, pembuktian, dan pengembangan suatu hal. Metode penelitian memiliki berbagai jenis, Gay (1977) berpendapat bahwa garis pemisah antara penelitian dasar dan terapan sangat tipis, bahkan bisa dibilang keduanya saling melengkapi dalam spektrum yang sama. Sementara itu, Jujun S. Suriasumantri (1985) memberikan pandangan yang lebih tegas, yakni penelitian dasar lebih berorientasi pada penemuan pengetahuan baru, sedangkan penelitian terapan lebih fokus pada penyelesaian masalah nyata.

Penelitian dapat dilakukan dengan dua metode utama yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif, yang sering disebut sebagai pendekatan post-positivistik, lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui analisis data yang bersifat deskriptif. Sebaliknya, penelitian kuantitatif, yang berakar pada filsafat positivisme, lebih fokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menyelami secara mendalam fenomena yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dalam lingkungannya yang natural. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, serta memahami makna yang tersembunyi di balik perilaku dan tindakan subjek penelitian (Creswell, 2014:4). Menurut Pasolong (2013:5), penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu deskriptif, eksplanatori, dan eksploratif. Penulis memilih pendekatan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan peran *stakeholder* dalam menurunkan prevalensi *stunting* di

Kabupaten Pati. Melalui pendekatan ini, permasalahan yang diteliti yaitu penurunan prevalensi *stunting* akan dijelaskan dengan cara mendeskripsikan secara terperinci.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah latar belakang atau lokasi fisik penelitian dilakukan. Pemilihan situs penelitian harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Tempat lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih adanya berbagai kekurangan dalam hubungan antar aktor, yang mengakibatkan kurang efektifnya upaya pencegahan *stunting* di daerah ini hingga tahun 2024.

Fokus penelitian adalah analisis *stakeholders* yang terlibat dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Penulis fokus pada analisis pemangku kepentingan dan pelaksanaan program karena pelaku pemberdayaan tidak hanya kelompok masyarakat saja, namun juga melibatkan berbagai kategori pelaku, seperti berbagai tingkat pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta .

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian juga dikenal dengan istilah informan penelitian atau narasumber, merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki informasi relevan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Informan berguna untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi secara akurat dan cepat (Moleong, 2021). Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013)

terdapat beberapa teknik pemilihan informan yang bisa digunakan, diantaranya adalah *snowball sampling* dan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan dalam dilakukan setelah peneliti terjun ke lapangan, berlanjut sepanjang penelitian belum selesai. Penentuan informan bergantung pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh informan sesuai dengan posisinya saat wawancara dilakukan.

Pemilihan subjek pada penelitian dilakukan secara *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah metode penentuan narasumber atau informan yang bersifat bergulir, mengikuti arahan dari informan yang ditentukan. *Snowball sampling* digunakan untuk pengambilan sampel secara sengaja, dimana *key informan* menjadi titik awal untuk mencari informan selanjutnya. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati. Kemudian akan berlanjut menggulung mengikuti arahan sampai ada kejenuhan data.

Menurut Pongtiku (2017), informan merupakan individu yang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini, informan adalah para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), seperti akademisi, media, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan LSM. Mereka akan memberikan data dan pandangan yang berharga untuk memahami lebih dalam mengenai program ini..

1.8.4 Jenis Data

Subroto (dalam Nugrahani, 2014) menjelaskan bahwa data adalah informasi mentah yang perlu ditemukan dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif, yang berupa kata-kata, teks, dan frasa yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Data kualitatif ini akan digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai peran para pemangku kepentingan dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, termasuk informasi, pernyataan, dan tanggapan yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan pemerintah, dokumen, dan penelitian terdahulu. Data sekunder ini dapat berasal dari dokumen, jurnal penelitian, artikel ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian, dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan bisa dipertanggungjawabkan.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Arikunto (dalam Nugrahani, 2014), sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek yang menjadi tempat diperolehnya data. Dalam proses penelitian, penting bagi peneliti untuk memiliki sumber data yang konkret untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data dan informasi yang dikumpulkan. Lofland dan Lofland (1984:47) menyatakan bahwa dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, sumber utama data terdiri dari rangkaian kata-kata dan tindakan, sementara itu peneliti juga dapat

menggunakan tambahan data seperti dokumen pendukung yang masih berkaitan dengan topik penelitian seperti dokumen dan foto yang dimiliki. Sumber data merujuk kepada subjek yang memiliki bukti berupa data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian adalah informasi atau fakta yang relevan dan diperoleh untuk mendukung proses analisis dan mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Sumber data primer

Mengutip Azwar (2010), data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki pengetahuan langsung tentang program penurunan *stunting* di Kabupaten Pati. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam perspektif dan pengalaman para informan terkait implementasi program tersebut.

b) Sumber data sekunder

Mengutip Azwar (2010), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan penelitian atau keperluan lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang peran pemangku kepentingan dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Pati. Data sekunder yang digunakan, antara lain:

- a. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia;
- b. Survei Status Ekonomi Sosial (<https://silastik.bps.go.id/>);
- c. Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;

- d. Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati;
- e. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444.1/5879 tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati;
- f. Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1986 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati;
- g. Peraturan Bupati Pati nomor 11 Tahun 2020;
- h. Artikel pada laman resmi Pemkab Pati (patikab.bps.go.id) mengenai angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati tahun 2020 – 2022.
- i. Artikel jurnal dan berita lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipilih pada penelitian ini terdiri dari teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan studi pustaka.

a) Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2016) menjelaskan bahwa wawancara merupakan kegiatan pemberian informasi melalui metode tanya jawab yang dilaksanakan oleh dua orang dalam rangka memperoleh pendapat maupun keterangan terkait suatu hal yang relevan dengan topik penelitian. Jenis wawancara pada penelitian kualitatif dianjurkan untuk menggunakan jenis wawancara terbuka, di mana pada wawancara terbuka Informan menyadari adanya proses wawancara dan memahami tujuan

dari wawancara yang dilakukan. Sugiyono (2016) berpendapat bahwa data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara umumnya bias atau dengan kata lain data tersebut tidak akurat dan bersifat subjektif. Dengan demikian, untuk menghindari timbulnya data bias diperlukansikap netral dan kemampuan peneliti dalam menjelaskan serta memberikan pertanyaan yang jelas kepada narasumber.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung di lapangan berguna untuk melihat dan memahami perubahan yang sedang terjadi berkaitan dengan fenomena yang diteliti untuk selanjutnya dilakukan penilaian atasnya. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan, aktivitas yang berlangsung. Kegiatan mengamati objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya sebuah peristiwa disebut dengan observasi secara langsung. Sedangkan, observasi dengan melalui perantara tertentu seperti film, video, dan rangkaian foto disebut dengan observasi secara tidak langsung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pati. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti empiris yang dapat digunakan untuk menguji, menjelaskan, dan bahkan memprediksi fenomena yang terjadi di lapangan.

d) Studi Kepustakaan

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa studi dokumen atau pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data lainnya.

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data penelitian yang diperoleh melalui beragam jenis sumber bacaan seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, serta berbagai literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lebih lanjut, kegiatan studi pustaka berguna untuk membantu memberikan kredibilitas bagi hasil penelitian. Meskipun demikian, hal yang perlu dicermati bagi peneliti adalah tidak semua jenis dokumen mempunyai kredibilitas tinggi sehingga peneliti wajib untuk memilih dan memilah dokumen penunjang sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Moleong (2010:28) menjelaskan analisis data sebagai proses penyusunan data secara sistematis dan mengorganisasikannya menjadi pola deskriptif, kategori, serta unit-unit dasar sehingga topik utama dapat diidentifikasi, dan hipotesis kerja dapat dirancang berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan pengolahan data secara induktif, langkah analisis pun dilakukan. Proses analisis mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

a) Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang didapat serta melakukan pengabstrakan dan transformasi data kasar.

b) Penyajian data

Penyajian data adalah dengan mengatur informasi yang diperoleh secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

c) Menarik kesimpulan

Data yang tersedia untuk ditarik kesimpulan bersifat sementara., karena hasil bisa berubah dalam prosesnya nanti.

1.8.8 Kualitas Data

Pelaksanaan penelitian kualitatif harus didasari oleh suatu standar. Standar tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian tidak dipertanyakan dan diakui kredibilitasnya. Pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif sendiri biasanya menggunakan beberapa metode, salah satunya metode triangulasi.

Triangulasi merupakan sebuah metode yang mengumpulkan seluruh data yang didapat untuk kemudian dikerucutkan sehingga mendapatkan data inti yang diperlukan. Penggunaan standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif bertujuan agar hasil yang didapatkan nantinya bisa dipercaya dan sesuai fakta di lapangan, oleh karena itu perlu adanya penggunaan triangulasi data dalam sebuah penelitian kualitatif. Triangulasi sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk mengerucutkan hasil penelitian yang didapat sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

Sugiyono (2009) mendefinisikan triangulasi data sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan metode yang sama. Moleong (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis triangulasi, di antaranya triangulasi sumber, metode, dan teori.

Penelitian ini menerapkan kombinasi triangulasi dan sumber, metode ini berusaha untuk membandingkan kemudian menguji informasi yang diperoleh menggunakan data berdasarkan waktu dan alat yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Memadankan data wawancara dan data observasi.
2. Memadankan apa yang dikatakan orang di depan umum dan secara pribadi.
3. Memadankan evaluasi orang-orang tentang status penelitian dengan perubahan mereka dari waktu ke waktu.
4. Memadankan situasi dan pendapat seseorang dengan orang-orang biasa, pendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, pejabat pemerintah, dll.
5. Memadankan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait